

BAB 2

ANGGARAN PERTAHANAN INDONESIA TAHUN 2000-2004

Dalam bab ini akan dibahas mengenai anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah sejak tahun 2000 hingga 2004. Pembahasan mengenai anggaran akan dibagi menjadi beberapa bagian, pertama, anggaran pertahanan dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, anggaran pertahanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketiga, mengenai perbandingan alokasi anggaran pertahanan dengan anggaran pendidikan dan kesehatan. Keempat, besaran anggaran pertahanan Indonesia. Kelima, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan pertahanan Indonesia. Keenam, mengenai kredit ekspor pertahanan Indonesia. Ketujuh, melihat proyeksi anggaran pertahanan Indonesia tahun 2005-2009. Dan terakhir adalah kesimpulan dari bab ini.

Salah satu faktor penunjang terwujudnya kemampuan pertahanan adalah daya dukung anggaran.⁵³ Pada dasarnya anggaran merupakan sebuah bentuk kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran pertahanan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan dan kebijakan negara dalam menyikapi sistem pertahanan yang digunakan serta untuk melihat sumber daya yang diberikan oleh negara kepada angkatan bersenjata, dan komitmen negara dalam pengelolaan dan peningkatan kapabilitas pertahanan.

Bila melihat dukungan anggaran pertahanan dalam periode berlakunya Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004, pembangunan bidang pertahanan kurang mendapat perhatian, seperti ditunjukkannya dari kecil jumlah anggaran yang dialokasikan karena orientasi pembangunan nasional masih berfokus pada bidang ekonomi.⁵⁴ Selama periode ini, penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan.

⁵³ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, *Op. cit.*, hal. 16.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 99.

2.1. Alokasi Anggaran Pertahanan Tahun 2000-2004 Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Pengukuran umum yang digunakan untuk melihat kapabilitas pertahanan dalam hal anggaran suatu negara adalah komparasi antara anggaran pertahanan dengan keseluruhan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Data yang menunjukkan ukuran besarnya anggaran pertahanan sebagai bagian atau persentase dari keseluruhan pengeluaran publik dan GDP/GNP adalah sangat penting.⁵⁵ PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu.⁵⁶ Sedangkan menurut McEachern, GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.⁵⁷ PDB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

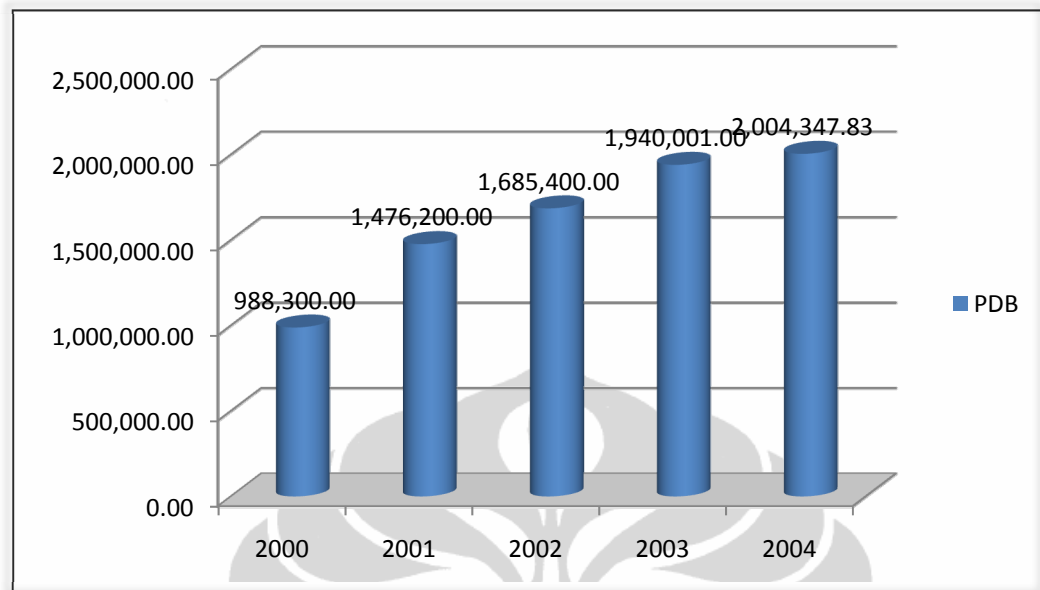
PDB Indonesia dari tahun 2000 hingga 2004 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2000 PDB Indonesia sebesar Rp. 988.300,00 milyar, pada tahun 2001 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 0,49% menjadi Rp. 1.476.200,00 milyar, pada tahun 2002 meningkat sebesar 0,14% menjadi Rp. 1.685.400,00 milyar, pada tahun 2003 meningkat sebesar 0,15% menjadi Rp. 1.940.001,00 milyar. Pada tahun 2004 meningkat 0,03% menembus angka Rp. 2.004.347,83 milyar. Dengan demikian rata-rata peningkatan PDB Indonesia dari tahun 2000 hingga 2004 adalah 0,20% tiap tahunnya dengan jumlah PDB rata-rata sebesar Rp. 1.618.849,77 milyar. Lihat Grafik 2.1 dan 2.2.

⁵⁵ Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson, *Op. cit.*, hal. 136

⁵⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003.

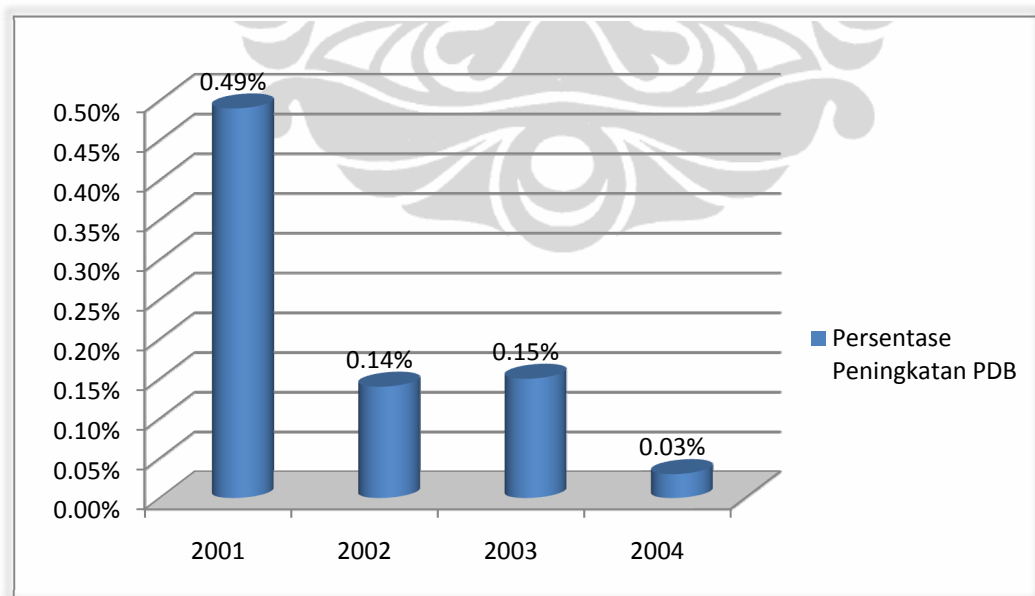
⁵⁷ William A. McEachern, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*, (Edisi Bahasa Indonesia) Jakarta: Thomson Learning Asia, 2000, hal. 146.

Grafik 2.1: Perkembangan PDB Indonesia 2000-2004



Sumber: Diolah dari Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

Grafik 2.2: Persentase Peningkatan PDB Indonesia 2000-2004



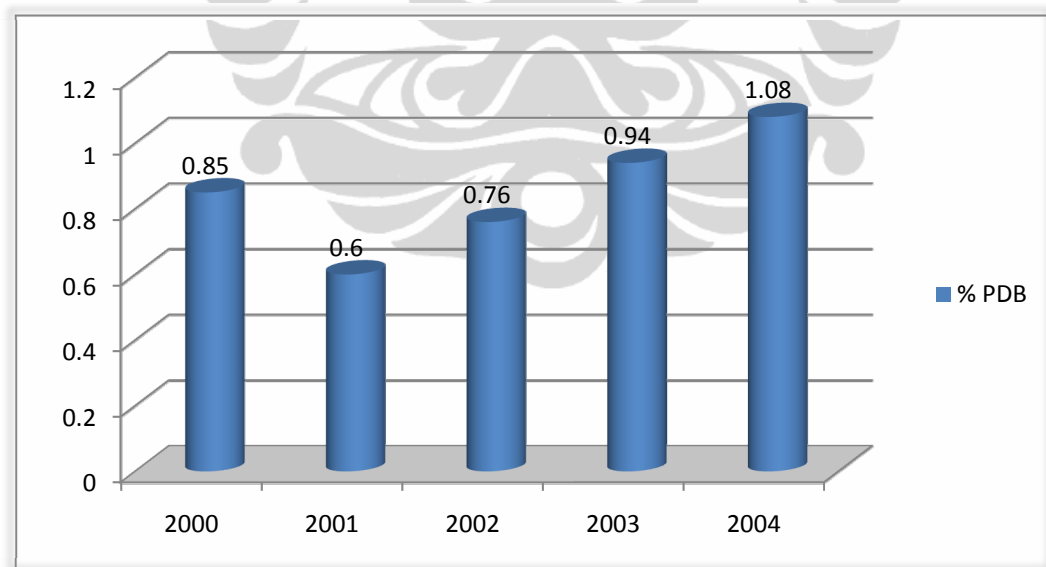
Sumber: Diolah dari Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

Walaupun dalam lima tahun tersebut PDB nominal meningkat dengan rata-rata tiap tahun sebesar 0,20% per tahun, namun peningkatan tersebut tidak

berbanding lurus dengan persentase alokasi anggaran bidang pertahanan dari PDB. Dalam kurun waktu 2000-2004 persentase anggaran pertahanan dari PDB tidak mengalami perubahan yang berarti. Rata-rata persentase alokasi anggaran pertahanan dari PDB tahun 2000-2004 tiap tahun sebesar 0,85% per tahun.

Pada tahun 2000 alokasi anggaran pertahanan sebesar 0,85 % dari PDB. Namun pada tahun 2001 mengalami penurunan yang sangat berdampak terhadap perkembangan kapabilitas militer Indonesia menjadi 0,6%. Di tahun 2002 alokasi anggaran pertahanan naik menjadi 0,76%. Pada tahun 2003 alokasi anggaran pertahanan naik menjadi 0,94%. Dan di tahun 2004 mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 1,08%. Melihat besaran persentase alokasi anggaran pertahanan Indonesia dari PDB yang seperti ini memunculkan rasa pesimis terhadap kemampuan Indonesia memperbaiki posisinya dalam perimbangan kekuatan militer minimal di kawasan Asia Tenggara. Lihat Grafik 2.3.

Grafik 2.3: Persentase Anggaran Pertahanan Indonesia Dari PDB 2000-2004



Sumber: Diolah dari Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

2.2. Alokasi Anggaran Pertahanan Tahun 2000-2004 Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan dan kebijakan negara dalam bidang anggaran pertahanan, selain dapat dilihat dari persentase PDB juga dapat dilihat dari persentase alokasi anggaran pertahanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara negara untuk kurun waktu satu tahun.⁵⁸ APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.⁵⁹

Beberapa ketentuan pokok perundang-undangan diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 2000 dan Tap MPR No. VII Tahun 2000, yang menjadi landasan bagi terbitnya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, merupakan landasan utama bagi TNI dalam membangun TNI profesional, efektif, efisien dan moderen. Dengan mengacu kepada ketentuan perundangan tersebut, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan satu-satunya sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan postur TNI.⁶⁰

APBN tahun 2000-2004 merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁶¹ APBN 2000-2004 sebagai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004. Selain mengacu kepada GBHN 1999-2004,

⁵⁸ Lihat Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001*, Departemen Keuangan RI.

⁵⁹ Ketentuan yang mengatur mengenai APBN terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

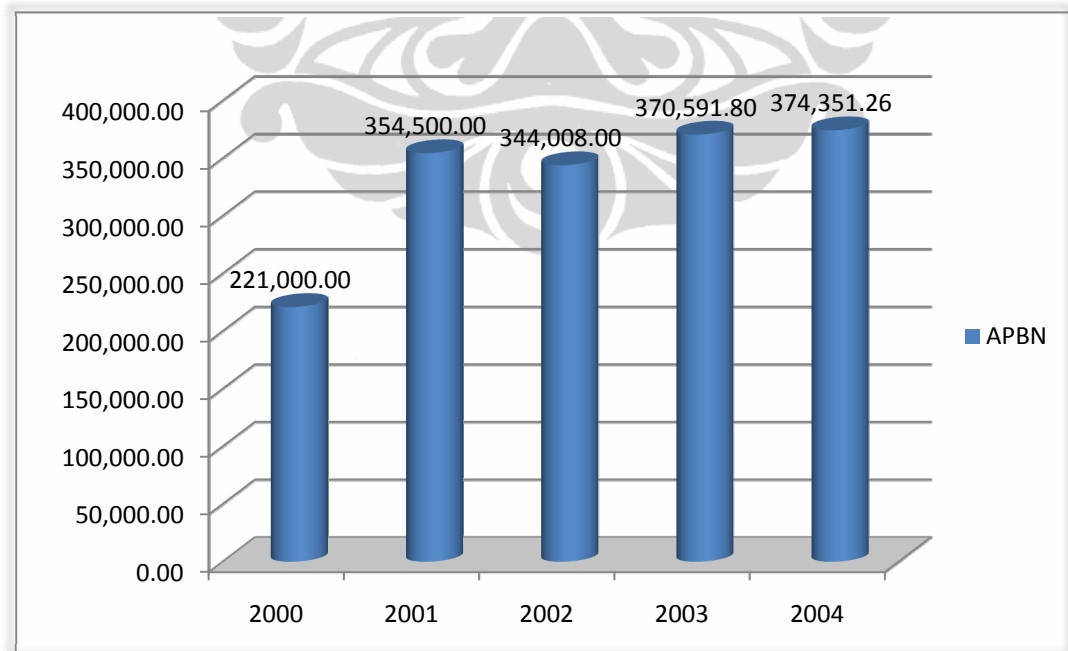
⁶⁰ Timotius D. Harsono, *Op. cit*, hal. 100.

⁶¹ Lihat Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000, 2001, 2002, 2003 dan 2004*, Departemen Keuangan RI.

penyusunan APBN 2000-2004 juga mengacu kepada Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah dan DPR di dalam rapat-rapat pembicaraan pendahuluan termasuk Repeta setiap tahunnya, serta program kerja kabinet yang bersangkutan.

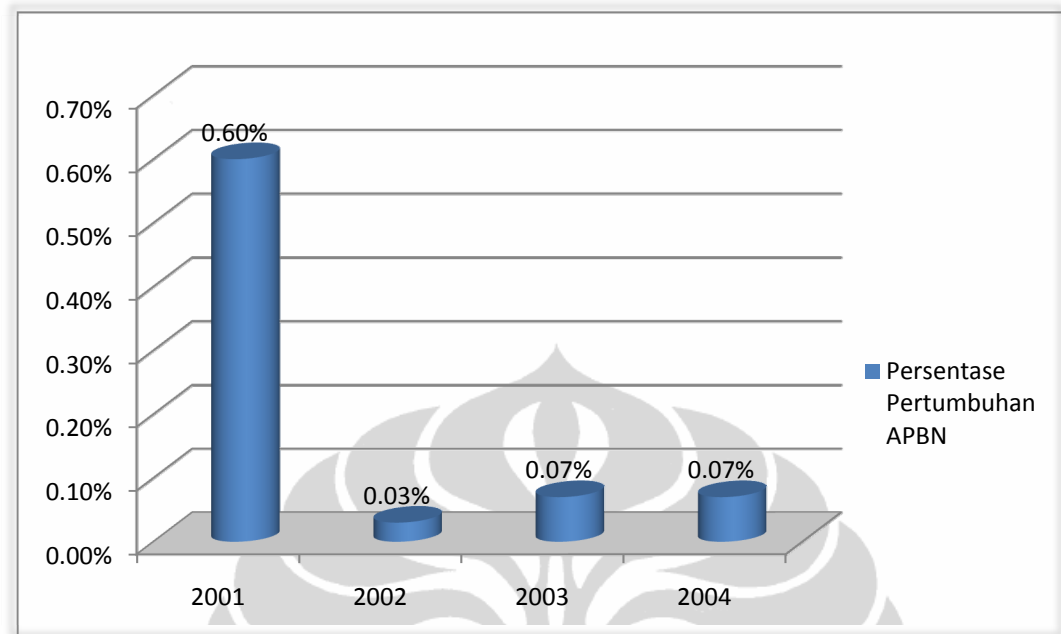
Berdasarkan data APBN tahun 2000 hingga 2004, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. APBN tahun 2000 sebesar Rp. 221.000,00 milyar. Pada tahun 2001 APBN mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,60% menjadi Rp. 354.500,00 milyar. APBN tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 344.008,80 milyar. Sedangkan dari APBN 2002 ke tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 0,07% menjadi Rp. 370.591,80 milyar. Untuk APBN tahun 2004 sebesar Rp. 374.351,26 milyar, dengan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,07%. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan APBN tahun 2000 hingga 2004 adalah 0,19% tiap tahunnya. Lihat Grafik 2.4 dan 2.5.

Grafik 2.4: Perkembangan APBN Indonesia 2000-2004



Diolah dari: Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

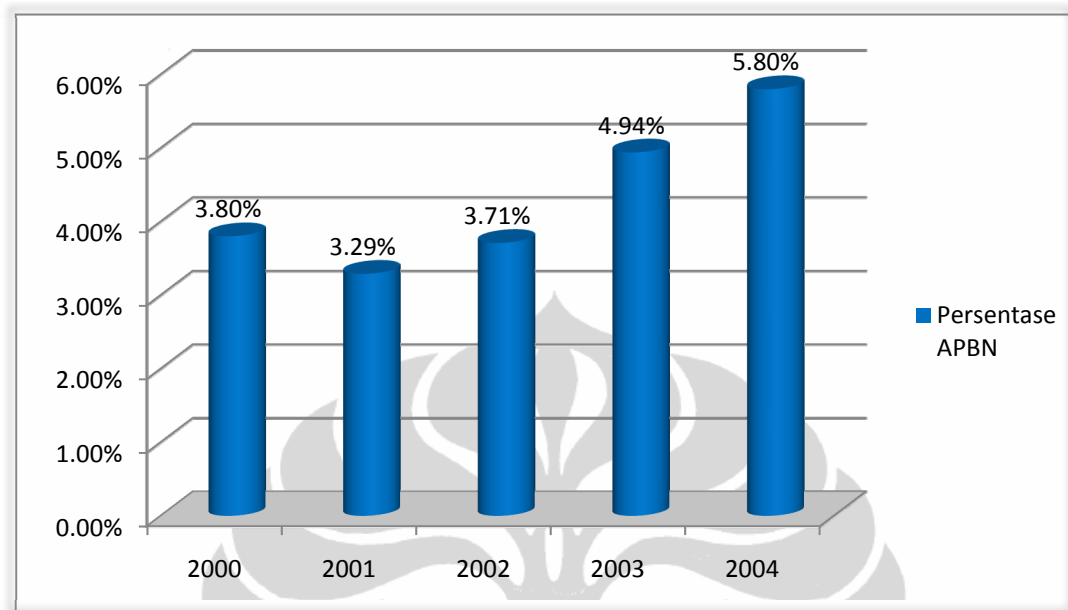
Grafik 2.5: Persentase Peningkatan APBN Indonesia 2000-2004



Sumber: Diolah dari Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

Dalam Grafik 2.6 dapat dilihat bahwa persentase alokasi anggaran pertahanan terhadap APBN tahun 2000-2004 terletak pada kisaran 3%-5%, dengan rata-rata 4,30% pertahun. Pada tahun 2000 alokasi anggaran pertahanan terhadap APBN adalah 3,8%. Sedangkan alokasi anggaran pertahanan terhadap APBN 2001 turun menjadi 3,29%. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2002 menjadi 3,71%. Pada tahun 2003 alokasi anggaran pertahanan terhadap APBN sebesar 4,94% dan pada tahun 2004 menjadi 5,8%. Bila dilihat proporsi APBN dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa APBN tidak pro terhadap sektor pertahanan.

Grafik 2.6: Persentase Anggaran Pertahanan Terhadap APBN Indonesia Tahun 2000-2004



Sumber: Diolah dari Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

2.3 Alokasi Anggaran Pertahanan Dibandingkan Dengan Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2000-2004

Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu kebijakan pemerintah yang ditetapkan dengan persetujuan DPR untuk mendukung pembiayaan bagi seluruh sektor pembangunan ataupun institusi pemerintah dalam melakukan kegiatannya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional secara bertahap. Yang termasuk dalam sektor pembangunan ataupun institusi pemerintah dalam hal ini diantaranya adalah Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan sebagainya.

Kebijakan anggaran sangat bergantung dari beberapa faktor diantaranya adalah skala prioritas pembangunan. Namun nampaknya kebijakan pembangunan belum memberikan prioritas yang proposional pada sektor pertahanan. Dukungan anggaran pertahanan saat ini orientasi pembangunan nasionalnya masih berfokus pada bidang ekonomi, sedangkan pembangunan bidang pertahanan kurang

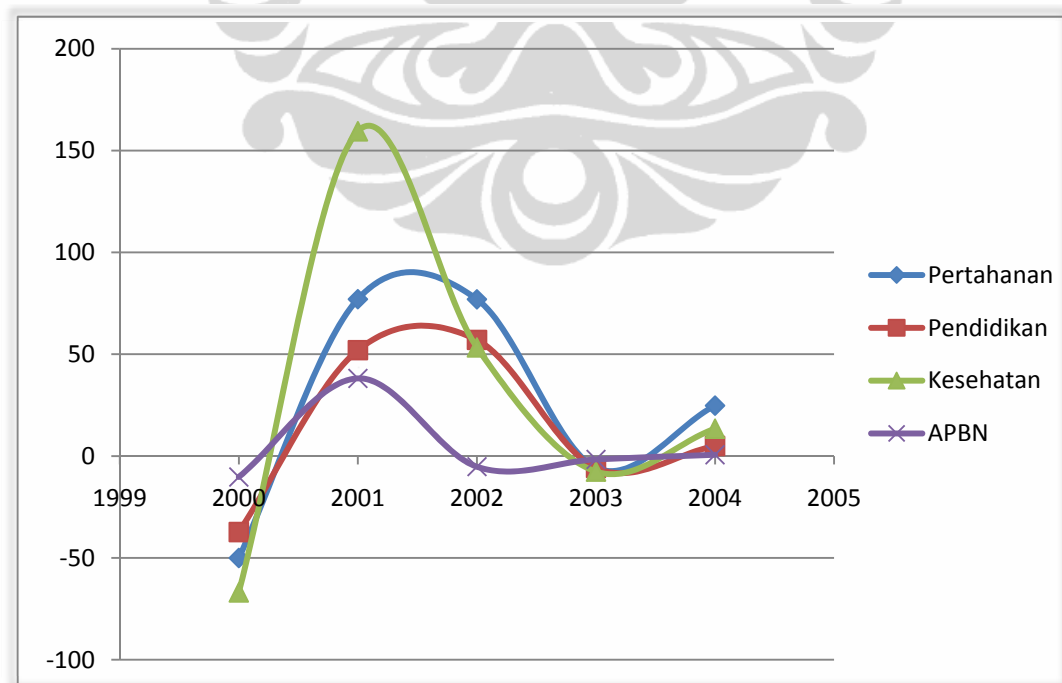
mendapat perhatian, seperti ditunjukkan dari kecilnya jumlah anggaran yang dialokasikan, kondisi ini berlaku sejak masa Orde Baru hingga saat ini.⁶² Belum berpihaknya kebijakan anggaran negara pada sektor pertahanan negara disebabkan oleh adanya persepsi bahwa sektor pertahanan tidak dapat diharapkan sebagai kontributor bagi perekonomian nasional. Dalam Tabel 2.1 dan Grafik 2.7 menjelaskan perbandingan kenaikan/penurunan anggaran dari tahun 2000 hingga 2004.

Tabel 2.1: Perbandingan kenaikan/penurunan anggaran 2000-2004

Tahun	Pertahanan	Pendidikan	Kesehatan	APBN
2000	-50.08	-37.31	-66.98	-10.28
2001	77.05	51.98	159.5	38.14
2002	76.98	57.01	53.32	-5.23
2003	-5.8	-5.85	-7.64	-1.64
2004	24.76	4.96	13.44	0.63

Sumber: Diolah dari UU APBN Tahun 1999-2004

Grafik 2.7: Perbandingan Kenaikan/Penurunan Anggaran 2000-2004

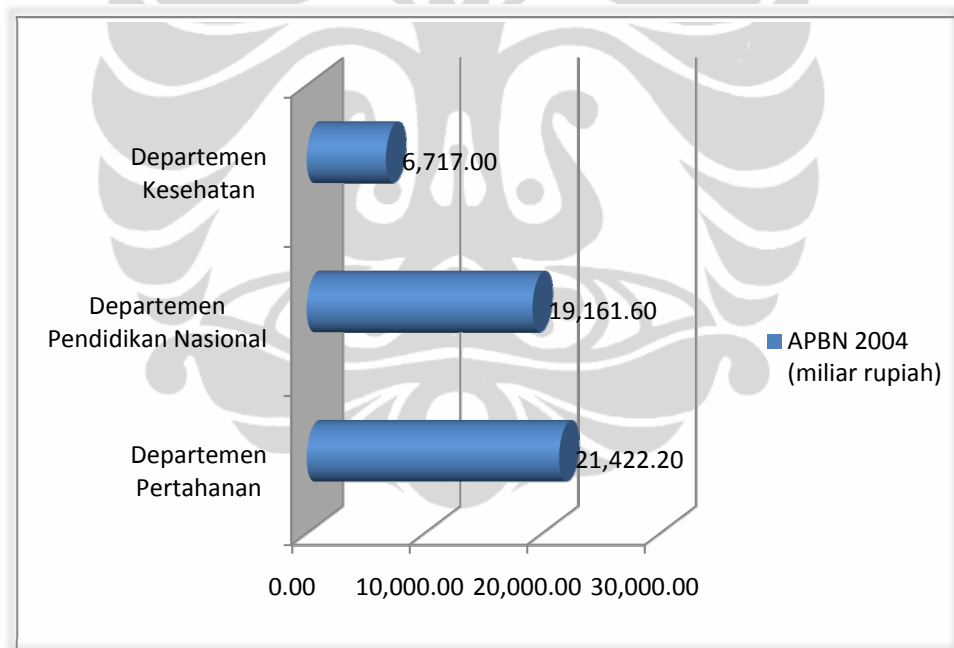


Sumber: Diolah dari UU APBN Tahun 1999-2004.

⁶² Timotius D. Harsono, *Op.Cit.*, hal. 133.

Berdasarkan Grafik 2.7, anggaran pada tahun 2000 mengalami penurunan sehingga berada di bawah garis nol. Sebenarnya yang terjadi adalah bukan penurunan, melainkan pada saat itu, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid menggeser tahun anggaran pada tahun 2000, dari Maret – April menjadi Januari – Desember. Dengan begitu, anggaran pada tahun 2000 sebetulnya anggaran pemerintah untuk delapan bulan saja sehingga jumlahnya menurun dan meningkat drastis pada tahun 2001. Anggaran pada tahun 2002 dan 2003 mulai mengalami penurunan. Bila melihat anggaran tahun 2004, anggaran pertahanan meningkat jauh di atas anggaran pendidikan dan kesehatan. Dapat diperkirakan, peningkatan anggaran tersebut didorong oleh biaya operasi militer di Nanggroe Aceh Darussalam.⁶³

Grafik 2.8: Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi APBN 2004



Sumber: Diolah dari Nota Keuangan dan RAPBN dan Belanja Negara TA 2005⁶⁴

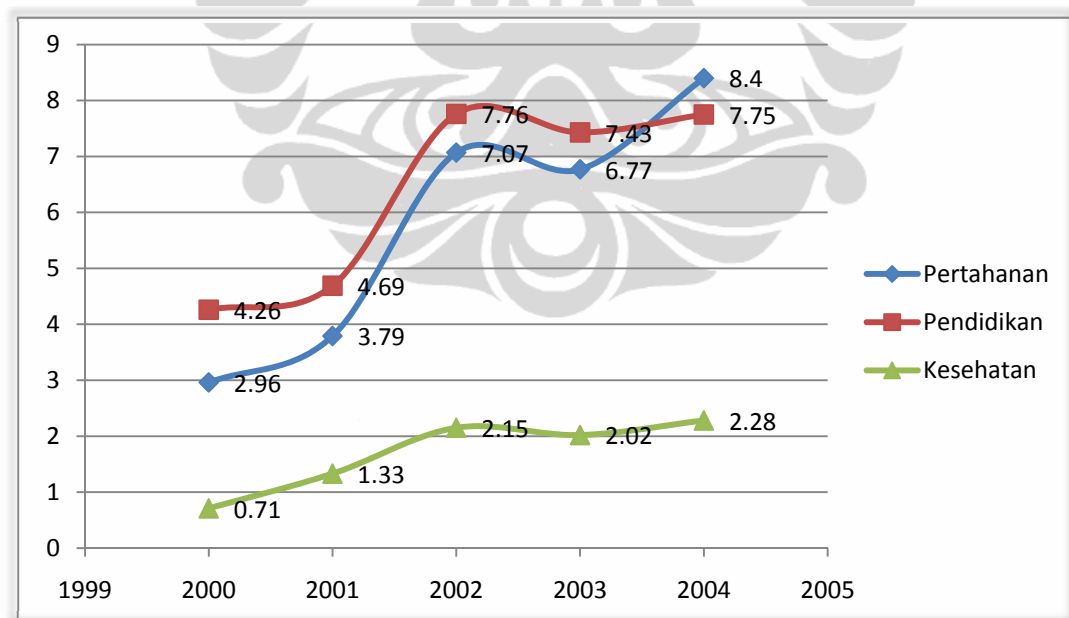
Berdasarkan Grafik 2.8, dapat dilihat bahwa anggaran pertahanan 2004 secara nominal juga lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pendidikan dan

⁶⁴ Lihat Departemen Keuangan, *Nota Keuangan dan RAPBN dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005*, Depkeu RI.

kesehatan. Pada tahun 2004 jumlah anggaran pertahanan sebesar Rp. 21.422,20 milyar, anggaran pendidikan sebesar Rp. 19.161,60 milyar, sedangkan anggaran kesehatan Rp. 6.717,00 milyar.

Anggaran belanja negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan ketiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu alokasi sumber daya, stabilisasi, serta distribusi.⁶⁵ Fungsi alokasi diterjemahkan dalam bentuk pengalokasian dana melalui anggaran belanja negara untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, salah satunya adalah untuk pertahanan negara. Bila dilihat dari persentase alokasi anggaran pertahanan terhadap APBN, maka dapat dikatakan bidang pertahanan bukan menjadi salah satu skala prioritas dibandingkan dengan bidang lainnya. Agar terlihat lebih jelas perbandingan anggaran dari masing-masing sektor, dapat dilihat Grafik 2.9 mengenai perbandingan dalam persen anggaran masing-masing sektor dengan total APBN.

Grafik 2.9: Perbandingan Dalam Persen Anggaran Masing-Masing Sektor Dengan Total APBN Tahun 2000-2004



Sumber: Diolah dari UU APBN Tahun 1999-2004⁶⁶

⁶⁵ Lihat Departemen Keuangan RI, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2003*, hal. 32.

⁶⁶ *Ibid*

Dalam Grafik 2.9 dapat dilihat persentase anggaran pertahanan terhadap APBN pada tahun 2004 posisinya berada di atas anggaran pendidikan, yaitu sebesar 8,4%. Rata-rata alokasi anggaran pertahanan terhadap APBN tahun 2000-2004 sebesar 6,74% per tahun. Rata-rata alokasi anggaran pendidikan terhadap APBN tahun 2000-2004 sebesar 6,38% per tahun. Sementara itu, secara keseluruhan alokasi anggaran untuk kesehatan jauh di bawah pertahanan dan pendidikan dengan rata-rata 1,70% per tahun.

2.4. Besaran Anggaran Belanja Pertahanan Tahun 2000-2004

Selama ini, penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Secara nominal memang terdapat peningkatan, sejak tahun 2000 pemerintah telah meningkatkan secara signifikan anggaran pertahanan. Pemerintahan Megawati telah meningkatkan anggaran pertahanan lebih dari 100% dari tahun 2000 hingga 2004.⁶⁷ Walaupun kenaikan secara nominal terjadi namun akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing, khususnya dolar AS, serta laju inflasi mengakibatkan nilai riil anggaran pertahanan menurun.⁶⁸ Penurunan nilai riil tersebut sangat membatasi upaya pembangunan kapabilitas pertahanan Indonesia.

Masalah anggaran pertahanan Indonesia yang serius tersebut, di samping karena secara nominal (kuantitas) memang kurang memadai akibat kemampuan ekonomi nasional Indonesia yang masih terbatas, juga disebabkan oleh penyusunan struktur anggaran yang tidak tepat, yakni adanya kecenderungan kecilnya porsi anggaran pembangunan yang telah berlangsung sejak tahun 2000.⁶⁹

Anggaran pertahanan Indonesia dari tahun 2000-2004 mengalami peningkatan secara kuantitas. Pada tahun 2000 anggaran pertahanan Indonesia sebesar Rp. 8.539,73 milyar, yang kemudian meningkat sebesar 0,37% menjadi Rp. 11.671,82 milyar pada tahun 2001. Pada tahun 2002 anggaran pertahanan meningkat kembali sebesar 0,09% menjadi Rp. 12.754,92 milyar, pada tahun

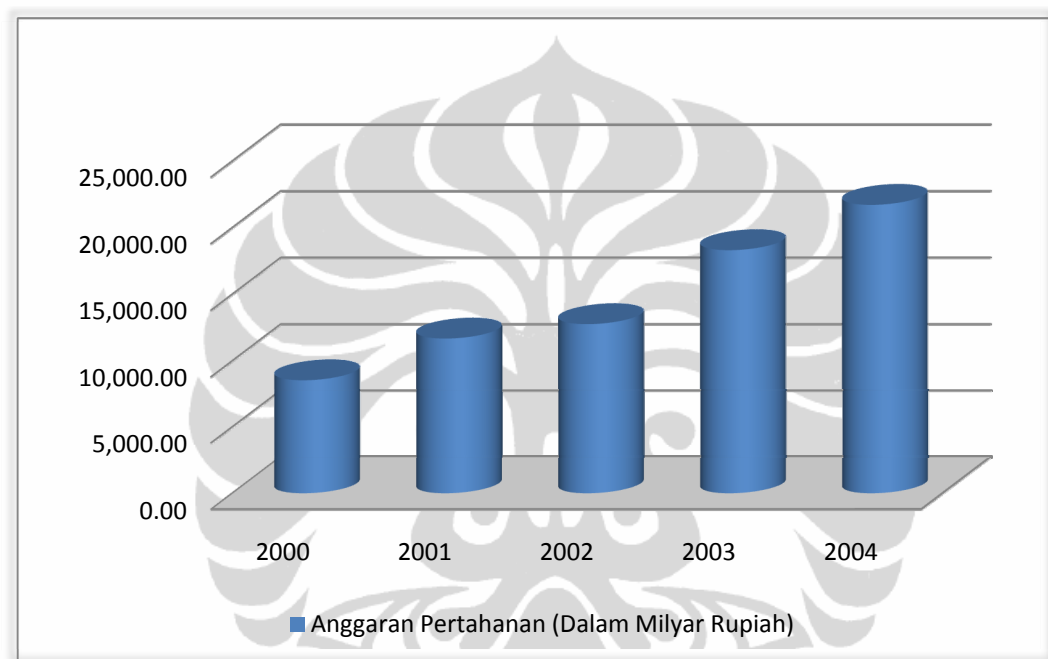
⁶⁷ Andi Widjajanto, *Pengembangan Kemampuan Pertahanan Indonesia*, Universitas Indonesia, hal. 6.

⁶⁸ Departemen Pertahanan, Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, *Op. cit.*, hal. 99.

⁶⁹ Direktorat Jenderal Rencana Strategis Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2004; dikutip dari Yahya A. Muhaimin, *Op. cit.*, hal. 97.

2003 kembali meningkat sebesar 0,44% menjadi Rp. 18.310,23 milyar. Pada tahun 2004 anggaran pertahanan meningkat sebesar 0,19% menjadi Rp. 21.711,69 milyar. Lihat Grafik 2.10 dan 2.11.

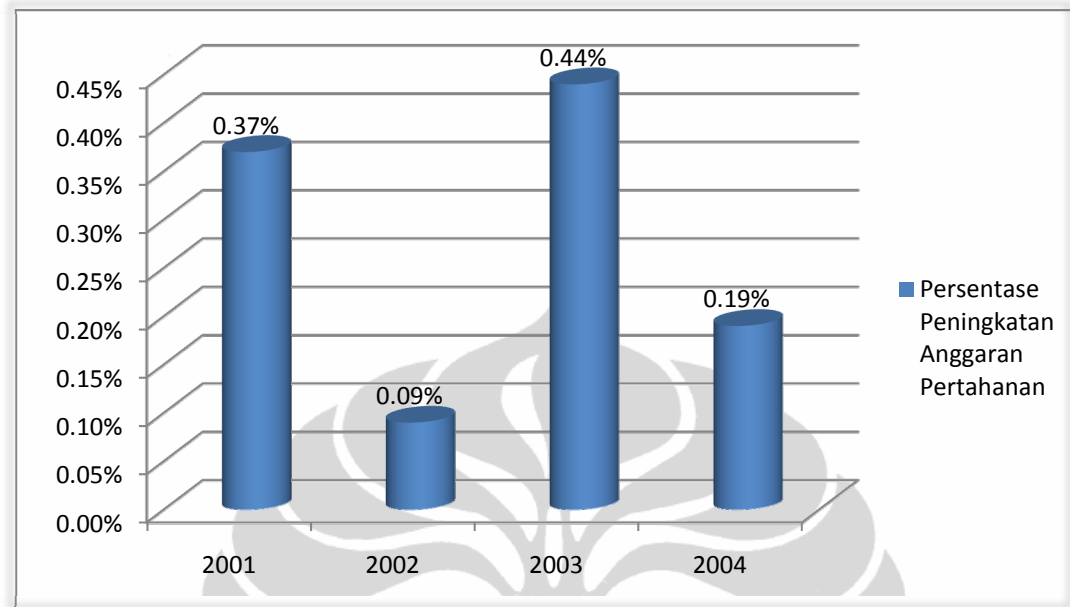
**Grafik 2.10: Perkembangan Anggaran Pertahanan Indonesia
Tahun 2000-2004**



Sumber: Diolah dari Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

Peningkatan secara nominal anggaran pertahanan ini dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia secara keseluruhan, ditambah lagi dengan beban dan tanggung jawab pertahanan yang cukup berat khususnya dengan meningkatnya potensi ancaman terutama ancaman non-tradisional, serta faktor geografi dengan luasnya wilayah yuridiksi nasional dan perimbangan kekuatan militer di kawasan.

**Grafik 2.11: Persentase Peningkatan Anggaran Pertahanan Indonesia
Tahun 2000-2004**



Diolah dari: Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

Grafik 2.10 memperlihatkan bahwa terdapat kenaikan anggaran pertahanan Indonesia di setiap tahunnya (2000-2004). Namun bila dilihat dari tingkat kenaikan anggarannya, rata-rata persentase kenaikan 0,27% tiap tahunnya tidak begitu memberikan pengaruh yang besar terhadap kapabilitas pertahanan Indonesia. (Lihat Grafik 2.11) Kenaikan anggaran pertahanan tersebut juga belum mampu memenuhi kebutuhan alutsista yang dibutuhkan untuk pengembangan kekuatan militer Indonesia, bahkan untuk mengimbangi anggaran pertahanan negara-negara lain di kawasan juga terasa sangat sulit.

Keterbatasan anggaran pertahanan ini mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan minimal untuk prioritas program pemeliharaan (*arms maintenance*).⁷⁰ Kondisi tersebut memaksa Departemen Pertahanan untuk melakukan tiga program utama *arms maintenance*, yaitu (1) perpanjangan usia pakai alutsista; (2) pengadaan alutsista baru atau rehabilitasi alutsista ditujukan hanya untuk kepentingan pengadaan materiil operasi; serta (3) pengadaan sarana komunikasi untuk meningkatkan komando pengendalian (Kodal) di Mabes TNI dan satuan-

⁷⁰ Andi Widjajanto dan Makmur Keliat, *Op. cit.*, hal. 11.

satuan tempur TNI.⁷¹ Ketiga program tersebut telah dijabarkan secara detail oleh Mabes TNI dan Mabes-mabes Angkatan melalui program pembangunan materiil per tahun di dalam dokumen Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004. Pengembangan pertahanan negara dalam program pembangunan materiil 2001-2004 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2: Rincian Program Pembangunan Materiil TNI Tahun 2001-2004

RENSTRA Pembangunan Materiil	Mabes TNI	Matra Darat	Matra Laut	Matra Udara
2001	Pembangunan materiil, diarahkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan senjata, munisi, suku cadang Alpal laut dan udara serta truk yang diperlukan untuk operasi dan latihan, alat peralatan khusus operasi lainnya serta alat peralatan kesehatan lapangan dan kendaraan bermotor. Pemantapan alat komunikasi komando dan pengendalian (Kodal) 	Pembangunan materiil diarahkan untuk memelihara kekuatan materiil yang sudah ada, pengadaan materiil baru hanya untuk mengganti materiil yang sudah habis usianya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Ranmor: Sepeda motor, Truk dan Bus. Alat optic: GPS dan teropong. Peralatan mesin/peralatan kantor. Kaporsatlap: tenda dan Veldbed Peralatan mountenering dan selam. Dapur lapangan. Peralatan kesehatan. 	Pembangunan materiil diprioritaskan untuk pengadaan KRI pengganti yang sudah dispose, perpanjangan usia pakai KRI, rehabilitasi Ranpur Marinir dan pengadaan sarana prasarana Pangkalan TNI AL dan Lembaga Pendidikan. <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Kapal Patroli Cepat jenis "Fast Patrol Boat 57 NAV-V" dan Kapal Bantu Personil. Rehab Kapal Perusak Kawal Rudal kelas Fatahillah. Perpanjangan usia pakai Kapal Angkut Tank kelas KRI Teluk Langsa. Pengadaan Kapal 	Pembangunan Materiil. <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan pesawat latih Helly dan latih dasar. Melanjutkan Refurbishment SA – 330. Malanjutkan proses Falcon-up pesawat F-16. Pengadaan suku cadang pesawat udara. Pengadaan peralatan pemotretan udara, pemetaan dan p- enginderaan. Pengadaan Almatsus, Alkomsus, dan Aldoksus Intelpam. Pengadaan peralatan laboratorium

⁷¹ *Ibid.*, hal. 12.

	<p>Panglima TNI, Kodal satuan-satuan TNI dan penyediaan alat komunikasi cadangan strategis.</p>	<p>8. Alat peralatan K31. 9. Almatsus. 10. Helly. 11. Over haul Engine Helly. 12. Meriam 23.</p>	<p>jenis KAL-28 dan KAL-12. 5. Pengadaan Pesawat jenis Casa-212 dan Helly berkemampuan Anti Kapal Selam. 6. Pengadaan dan Rehab Ranpur Marinir dan melengkapi peralatan dalam rangka pemantapan Pasmal-1. 7. Melengkapi sarana komunikasi, radar dan teropong untuk Posal-posal di ALKI serta sarana patrol dan Sepeda motor Lanal kelas C.</p>	<p>Aerofisiologi dan Alpalkes. 8. Pengadaan peralatan pergudangan dan Alsatri. 9. Pengadaan Alkomlek dan Alpernika. 10. Pengadaan Ground Support Equipment. 11. Pengadaan peralatan meteo dan alat bantu navigasi. 12. Pengadaan hangar sweeper di Lanud-lanud. 13. Pengadaan sarana pelayanan BMP pesawat. 14. Pengadaan peralatan zeni Satharlan Paskhas. 15. Melanjutkan proses pengadaan pesawat CN-235 MPA. 16. Modifikasi roket pod pesawat Hawk 100/200. 17. Pengadaan Automatic Logistic Management System (ALMS)</p>
2002	<p>Pembangunan materiil, diarahkan untuk:</p> <p>1. Pengadaan senjata, suku cadang alp</p>	<p>Pembangunan materiil diarahkan untuk melanjutkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada, pengadaan materiil baru hanya</p>	<p>Pembangunan materiil diprioritaskan untuk pengadaan KRI pengganti yang sudah dispose, perpanjangan usia pakai KRI, rehabilitasi Ranpur</p>	<p>Pembangunan Materiil.</p> <p>1. Melanjutkan proses Refurbishment SA-330. 2. Melanjutkan proses Falcon-up pesawat</p>

	<p>laut dan udara untuk mengganti mariner dan pengadaan truk yang materiil yang sudah KAL serta melengkapi diperlukan habis masa pakainya. sarana prasarana misiion equipment untuk operasi Jenis materiil yang Pangkalan TNI AL dan CN-235MPA. dan latihan, akan diadakan Lembaga Pendidikan. 4. Pengadaan suku alat peralatan meliputi: 1. Pengadaan Kapal cadang, sarana khusus 1. Ranmor: Sepeda Patroli Cepat yang bantuan dan operasi Motor dan Truk. berkemampuan Anti peralatan lainnya serta 2. Alat optic: GPS Kapal Permukaan pemeliharaan alat peralatan dan teropong. Air dan Anti dalam rangka kesehatan 3. Peralatan mesin/ Peperangan Udara. rehabilitasi lapangan dan peralatan kantor. 2. Repowering Kapal Alutsista. Ranmor. 4. Alat angkut Perusak Kawal kelas 5. Pengadaan materiil perairan meliputi KRI Patimura, Alkomsus, Komlek untuk jenis-jenis LCU, Kapal Perusak Alkomlek, melanjutkan KMC dan OBM. KRI Rudal kelas Alpernika, pemantapan 5. Alkom meliputi KRI Fatahillah dan Almatus, Kodal HT Ruset dan Kapal Cepat Roket Aldoksus dan Panglima 6. Alsatri. 3. Perpanjangan usia Intelpam. TNI, Kodal 7. Perlengkapan pakai Kapal Angkut Tank kelas KRI Satuan-satuan lapangan Teluk Kau dan dan TNI, meliputi tenda, Kapal Bengkel Apung kelas KRI penyediaan Aldurlap dan Jaya Wijaya. Strategis 8. Kapor untuk 4. Pengadaan kapal Terpusat serta Dikma. jenis KAL-28 dan 5. Pengadaan pesawat Penggelaran 9. Almount dan alat jenis KAL-12. udara jenis Casa- Pengamanan 10. Alberzi, 212 dan Helly. ALKI. Aljihandak, dan 6. Rehab Ranpur Toolkit. Marinir dan 11. Alpal topografi. melengkapi 12. Munisi kaliber peralatan dalam rangka melanjutkan pemantapan Pasmart-1. 13. Alat-peralatan perbekalan udara. 1. 14. Helly. 7. Melengkapi sarana 15. Senjata ringan komunikasi, radar dan teropong untuk khusus.</p>	<p>F-16. 3. Penggantian mission equipment CN-235MPA. 4. Pengadaan suku cadang, sarana bantuan dan peralatan pemeliharaan dalam rangka rehabilitasi Alutsista. 5. Pengadaan Alkomsus, Alkomlek, Alpernika, Almatus, Aldoksus dan Intelpam.</p>
--	---	---

			Posal-posal di ALKI.	
			8. Peremajaan peralatan survey dan pemetaan Hidro oceano graphy.	
			9. Perbaikan peta-peta laut.	
			10. Peremajaan Alkomlek stasiun pemancar Gerungan dan pemasangan jaringan internet di Seskoal.	
			11. Pengadaan Rantis ¼ ton (Jeep), kendaraan pemadaman kebakaran dan ambulance.	
2003	Pembangunan materiil diarahkan untuk:	Pembangunan materiil diarahkan untuk melanjutkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada, pengadaan materiil baru hanya untuk mengganti materiil yang sudah habis masa pakainya, jenis materiil yang akan diadakan meliputi:	Pembangunan Materiil diarahkan untuk melanjutkan penyiapan dan penyediaan KRI, KAL, Pesud dan Banpur untuk mendukung kebutuhan patroli, patroli tempur dan dukungan lainnya meliputi:	Pembangunan materiil diarahkan untuk melanjutkan kebutuhan pengadaan materiil satuan kerja di jajaran TNI AU meliputi:
	1. Pengadaan senjata, munisi, suku cadang Alpal laut dan udara yang diperlukan untuk operasi dan latihan, alat peralatan khusus operasi lainnya serta alat peralatan kesehatan lapangan dan Ranmor.	1. Ranmor: Sepeda Motor dan Truk. 2. Alat optic: GPS dan teropong. 3. Peralatan mesin / peralatan kantor. 4. Alang air: KMC dan OBM 5. Alkom: HT Ruset	1. Pengadaan Kapal Selam dan Kapal Patroli Cepat berkemampuan Anti Peperangan Udara dan Pernika. 2. Repowering dan rehab Kapal Perusak Kawal kelas KRI Patimura, Kapal Perusak Kawal Rudal kelas KRI	1. Melanjutkan proses Refurbishment SA-330. 2. Rehabilitasi Pesbang, Sucad, Sarban. 3. Melanjutkan pengadaan film Vicom 70 (A-4) dan Vicom 18 seri 313 A (F-5) tahap III. 4. Pengadaan pesawat Helly Operasional dan Helly

	<p>Komplek dan Repeater. Fatahillah, Kapal VVIP/VIP. diarahkan 6. Alsatri. Selamat kelas KRI 5. Melanjutkan untuk 7. Perlengkapan Cakra dan Kapal pengadaan amunisi memenuhi satuan lapangan: Patroli Cepat Roket senjata dan Rudal. kebutuhan tenda, Aldurlap kelas KRI Mandau. 6. Pengadaan Alkomlek, dan Veldbed. 3. Perpanjangan usia Alins/Alongins. Alpernika dan 8. Kapur untuk pakai (PUP) Kapal 7. Pengadaan computer Dikma. Angkut Tank kelas Peralatan dalam rangka 9. Almount dan alat KRI Teluk Langsa. pemotretan udara, penggelaran 5 selam. 4. Pengadaan KAL 28 pemetaan SBM TMDA 10. Toolkit/Alberzi, dan KAL 12. aeronautika untuk Aljihandak dan 5. Pengadaan Heli Anti penginderaan jauh, pengembangannya Alnubika. Kapal Selam. survey teristris n K31 11. Alpal topografi. 6. Pengadaan dan tahap III. Hanudnas IV 12. Munisi Kaliber 8. Pengadaan alat dan Satrad kecil/besar khusus. Marinir dan peralatan meteo wilayah Timur 13. Alat perbekalan melengkapi dan Albanar. Indonesia, 14. Helly. rangka pemantapan 9. Pengadaan pengadaan 4 15. Alkes. Lanmar Piabung dan Ranmor, bekal SBM TDMA 16. Meriam-105. persiapan pelayanan BMP, pengganti yang lama, 17. Senjata Ringan. pembentukan Alpergud dan pengadaan Sucad SBM K31 Pasmars-2. ALMS. 10. Pengadaan unit Siskomsat TNI serta radar tahap II. pengadaan ECM Simulator.</p>	<p>6. Alsatri. 7. Perlengkapan satuan lapangan: tenda, Aldurlap dan Veldbed. 8. Kapur untuk Dikma. 9. Almount dan alat selam. 10. Toolkit/Alberzi, Aljihandak dan Alnubika. 11. Alpal topografi. 12. Munisi Kaliber kecil/besar khusus. 13. Alat perbekalan udara. 14. Helly. 15. Alkes. 16. Meriam-105. 17. Senjata Ringan.</p>	<p>Fatahillah, Kapal Selamat kelas KRI Cakra dan Kapal Patroli Cepat Roket kelas KRI Mandau. 3. Perpanjangan usia pakai (PUP) Kapal Angkut Tank kelas KRI Teluk Langsa. 4. Pengadaan KAL 28 dan KAL 12. 5. Pengadaan Heli Anti Kapal Selam. 6. Pengadaan dan Rehab Ranpur dan Marinir dan melengkapi peralatan dalam rangka pemantapan Lanmar Piabung dan persiapan pembentukan Pasmars-2. 7. Melengkapi sarana komunikasi, radar dan teropong untuk Posal-posal di ALKI.</p>	<p>VVIP/VIP. 5. Melanjutkan pengadaan amunisi senjata dan Rudal. 6. Pengadaan Alins/Alongins. 7. Pengadaan Peralatan pemotretan udara, pemetaan aeronautika penginderaan jauh, survey teristris tahap III. 8. Pengadaan alat peralatan meteo dan Albanar. 9. Pengadaan Ranmor, bekal umum, sarana pelayanan BMP, Alpergud dan ALMS. 10. Pengadaan unit radar tahap II.</p>
2004	<p>Pembangunan materiil, diarahkan: 1. Pengadaan senjata, suku cadang Alpal laut dan udara yang</p>	<p>Pembangunan materiil diarahkan untuk melanjutkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada, pengadaan materiil baru hanya untuk mengganti materiil yang sudah</p>	<p>Pembangunan materiil diarahkan untuk pengadaan KRI yang sudah dispose, perpanjangan usia pakai KRI, rehabilitasi Ranpur Marinir dan pengadaan KAL serta melengkapi</p>	<p>Pembangunan materiil diarahkan untuk: 1. Melanjutkan proses Refurbishment SA-330. 2. Rehabilitasi pesawat terbang, Sucad pesawat, sarana bantuan dan</p>

diperlukan untuk operasi dan latihan, alat peralatan khusus operasi lainnya serta alat peralatan kesehatan lapangan dan Ranmor.	habis masa pakainya. Jenis materiil yang akan diadakan meliputi: 1. Ranmor: Sepeda Motor, Truk dan Bus. 2. Alat optic: GPS dan teropong. 3. Peralatan mesin/peralatan kantor. 4. Alang air: KMC, LCR dan OBM. 5. Alkom: HT Ruset, Alkom Markas dan Repeater. 6. Alsatri. 7. Perlengkapan satuan lapangan: tenda, Aldurlap dan Veldbed. 8. Kapur untuk Dikma. 9. Almount dan alat selam. 10. Toolkit/Alberzi, Aljihandak dan Alnubika. 11. Alpal topografi. 12. Munisi kaliber kecil/besar musus. 13. Alat perbekalan udara. 14. Ranpur Tank Panhard. 15. Alkes. 16. Meriam-105. 17. Senjata Ringan.	sarana prasarana Pangkalan TNI AL dan Lembaga Pendidikan. 1. Pengadaan Kapal Selam. 2. Repowering dan Rehab Kapal Perusak Kawal kelas KRI Patimura, Kapal Perusak Kawal Rudal kelas KRI Fatahillah dan Kapal Cepat Roket kelas KRI Mandau. 3. Pengadaan Kapal KAL 28 dan Kapal KAL 12. 4. Pengadaan Pesawat Udaraintai taktis. 5. Pengadaan dan Rehab Ranpur Marinir dan melengkapi peralatan dalam rangka pemantapan Pasmal-2. 6. Melengkapi sarana komunikasi, radar dan teropong untuk Posal-posal di ALKI.	Fashar Alutsista. 3. Rehabilitasi dan pengadaan Sucad/unit Alkomlek. 4. Melanjutkan proses pengadaan film Vicom 70 (A-4) dan Vicom seri 313 A (F-5) tahap IV. 5. Melanjutkan proses pengadaan pesawat Helly Operasional dan Helly VIP (VVIP). 6. Melanjutkan proses pengadaan amunisi senjata serta rudal. 7. Pengadaan peralatan pemotretan udara, pemetaan penginderaan jauh, survey teretris tahap IV. 8. Pengadaan alat peralatan meteo dan Albanau. 9. Pengadaan Ranmor, bekal umum, sarana pelayanan BMP, Alpergud, ALMS dan Bar Code. 10. Melanjutkan
---	--	--	--

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/477/M/VII/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004.

Dari keseluruhan program pembangunan materiil per tahun yang tertera dalam Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004 tersebut, terdapat beberapa temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Beberapa sampel temuan pemeriksaan yang ditemukan oleh BPK RI dibagi dalam dua bagian yaitu Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dibagi lagi dalam tiga matra yaitu darat, laut dan udara.

Temuan pemeriksaan pada tahun anggaran 2004 pada Dinas Penerbangan TNI-AL (Disnerbal), pertama, pelaksanaan pemeliharaan pesawat udara dengan biaya anggaran rutin dan pembangunan sebesar Rp 28,98 milyar.⁷² Dari 34 kontrak pengadaan barang dan jasa, diketahui bahwa sebanyak 25 kontrak tersebut melekat biaya *Technical Representative* sebesar Rp 152,25 juta yang tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan penggunaan anggaran sebesar Rp 152,25 juta menjadi tidak efektif.⁷³

Kedua, dalam kegiatan *Overhaul Engine* pesawat Casa NC-212 terjadi ketidakwajaran penetapan harga perkiraan sendiri pada beberapa pekerjaan O/H Engine Garret sebesar Rp 518,40 juta dan ketidakwajaran penetapan harga kontrak sebesar Rp 509,02 juta.⁷⁴ Dari kedua contoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan anggaran pertahanan masih belum efektif. Hal tersebut berakibat pada rendahnya kualitas program pemeliharaan (*arms maintenance*) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan yang secara otomatis akan berdampak kepada upaya pemenuhan kebutuhan minimal.

2.5. Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2000-2004

Anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari APBN secara makro terbagi dalam dua porsi anggaran yaitu Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Merujuk pada Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2003, terdapat penjelasan bahwa yang termasuk dalam Anggaran Rutin adalah gaji,

⁷² Lihat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2005*, Jakarta: BPK RI, Maret 2006, hal. 35.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas. Sedangkan yang termasuk dalam Anggaran Pembangunan adalah pembangunan sistem, pembangunan personel, pembangunan fasilitas dan pembangunan material.⁷⁵ Dengan kata lain anggaran pembangunan berkaitan langsung dengan pemeliharaan dan pengembangan alat utama sistem persenjataan TNI.

Bila melihat data anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan tahun 2000 hingga tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa anggaran pertahanan lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin daripada untuk membiayai pengembangan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Rendahnya anggaran pembangunan tersebut sangat menyulitkan untuk penyusunan program yang besar dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional TNI secara menyeluruh.⁷⁶ Dengan demikian pola anggaran seperti ini dapat dikatakan masih berbasis pada kekuatan personel, padahal pola demikian tidak tepat bagi unit organisasi yang titik berat kekuatannya terletak pada alutsista berteknologi tinggi dalam menjaga kedaulatan negara kepulauan, seperti Indonesia.⁷⁷

Untuk tahun 2000 hingga 2004, pemerintah mengalokasikan rata-rata 72.40% anggaran belanja pertahanan untuk pemenuhan kebutuhan rutin. Pada tahun 2000 anggaran rutin sebesar Rp. 6.594,42 milyar. Pada tahun 2001 anggaran rutin meningkat sebesar 0,39% menjadi Rp. 9.150.97 milyar. Pada tahun 2002 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,08% menjadi Rp. 9.874,83 milyar. Pada tahun 2003 anggaran rutin meningkat sebesar 0,22% menjadi Rp. 12.021,94 milyar. Sedangkan pada tahun 2004 anggaran rutin meningkat sebesar 0,14% menjadi Rp. 13.741,92 milyar. Anggaran rutin ini ditujukan untuk (1) mendukung kegiatan organik, berupa perawatan personil, pemeliharaan materiil dan pembinaan sistem; (2) mendukung kegiatan fungsional berupa latihan matra, pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta fungsional lainnya; dan (3) mendukung kegiatan dalam rangka penggunaan kekuatan berupa operasi TNI

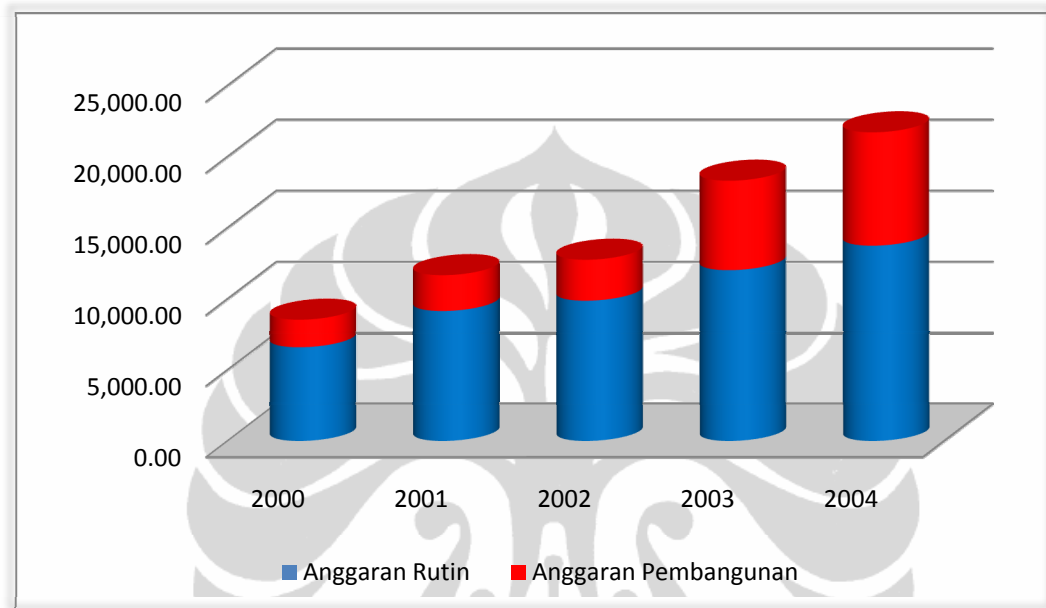
⁷⁵ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, *Op. cit.*, hal. 99-100.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Connie Rahakundini Bakrie, *Op. cit.*, hal. 6.

yang merupakan operasi rutin.⁷⁸ Dukungan anggaran belanja negara terhadap anggaran rutin dan pembangunan pertahanan dapat dilihat pada Grafik 2.12.

Grafik 2.12: Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Tahun 2000-2004

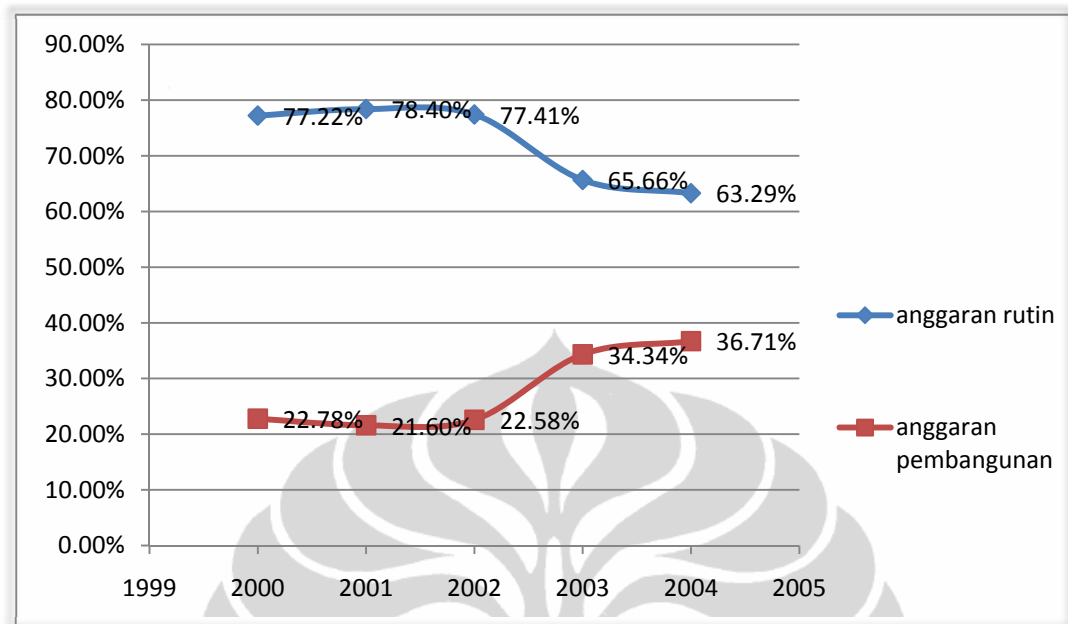


Sumber: Diolah dari Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

Sedangkan anggaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan pemeliharaan dan pengembangan alat utama sistem persenjataan TNI untuk tahun 2000 hingga 2004 hanya mendapat alokasi rata-rata 27,60% dari total anggaran pertahanan. (Lihat Grafik 2.12) Pada tahun 2000 anggaran pembangunan sebesar Rp. 1.945,31 milyar. Pada tahun 2001 anggaran pembangunan meningkat sebesar 0,30% menjadi Rp. 2.520,85 milyar. Pada tahun 2002 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,14% menjadi Rp. 2.880,11 milyar. Pada tahun 2003 anggaran rutin meningkat sebesar 1,18% menjadi Rp. 6.288,29 milyar. Sedangkan pada tahun 2004 anggaran rutin meningkat sebesar 0,27% menjadi Rp. 7.969,77 milyar.

⁷⁸ Andi Widjajanto dan Makmur Keliat, *Op.cit.*, hal. 5-6.

Grafik 2.13: Proporsi Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin Terhadap Anggaran Pertahanan Indonesia Tahun 2000-2004



Sumber: Diolah dari Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan RI; Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia 2003.

Dalam Grafik 2.13 dapat dilihat bagaimana persentase proporsi anggaran pembangunan dan anggaran rutin terhadap anggaran pertahanan selama tahun 2000 hingga tahun 2004. Pada tahun 2000 terlihat sekali kesenjangan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Kesenjangan tersebut semakin terlihat pada tahun 2001 dimana anggaran pembangunan hanya 1/3 kali dari anggaran rutin. Namun pada tahun 2002 kesenjangan tersebut mulai berkurang, hal tersebut terus terjadi hingga tahun 2004 dimana antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan hanya berbeda 26,58%. Bila dilihat pergerakan grafik tersebut terdapat kemungkinan arah struktur anggaran mengarah pada keseimbangan antara jumlah anggaran pembangunan dan anggaran rutin.

2.6. Rincian Belanja Anggaran Pertahanan Berdasarkan Kredit Ekspor Tahun 2000-2004

Dalam rangka pemenuhan pengadaan alutsista yang berasal dari pasar senjata internasional, sumber pendanaan utama Indonesia untuk periode 2000 hingga 2004 adalah fasilitas Kredit Ekspor. Kredit Ekspor merupakan salah satu dari tiga kategori dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) berdasarkan

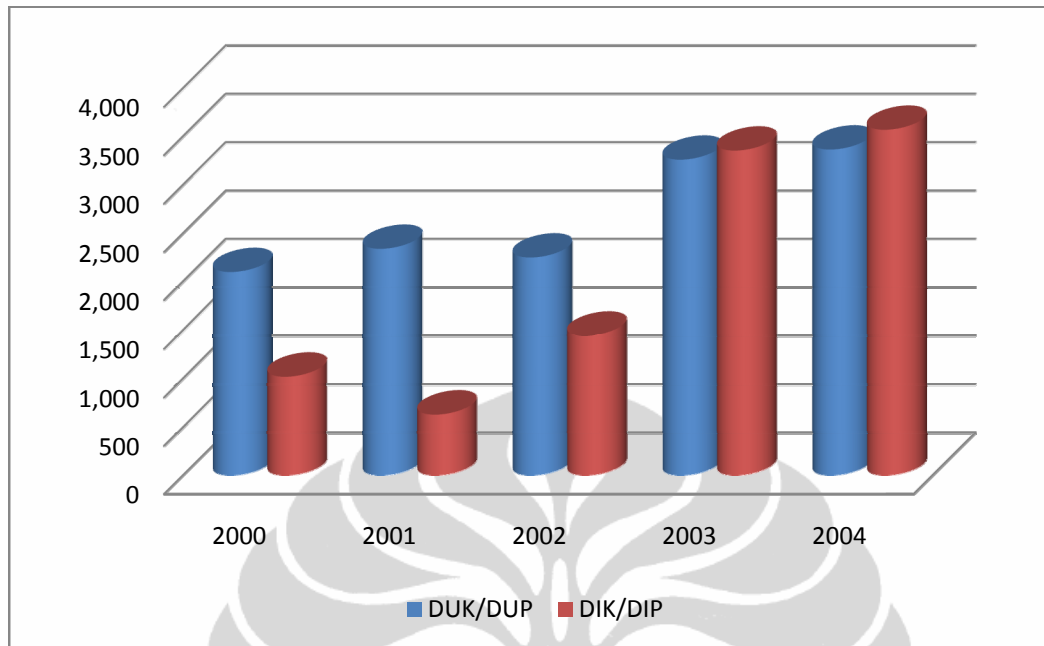
syarat pengembaliannya. Dua kategori lainnya adalah Pinjaman Lunak dan Pinjaman Komersial.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan Kredit Ekspor sebagai pinjaman luar negeri yang diberikan oleh lembaga keuangan suatu negara yang didukung oleh negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang dari negara pemberi pinjaman.⁷⁹ Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan mendefinisikan Pinjaman Kredit Ekspor sebagai: "pinjaman yang diberikan oleh negara-negara pengekspor dengan jaminan tertentu (*Guarranted Loan*) dari pemerintahnya dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan di satu pihak, dan dipihak lain untuk memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan negara pengimpor".⁸⁰

Di dalam rincian anggaran pembangunan pertahanan tahun 2000 hingga 2004, terdapat biaya kredit ekspor setiap tahunnya. Pada tahun 2000, dari Rp. 2.100,00 milyar yang diusulkan Departemen Pertahanan dalam DUK/DUP (Daftar Usulan Kegiatan/Proyek), realisasi anggaran dari pemerintah hanya berjumlah Rp. 1.020,25 milyar. Tahun 2001, dari Rp. 2.340,00 milyar dalam DUK/DUP, realisasi anggaran dari pemerintah semakin menurun 0,38% menjadi Rp. 631,80 milyar. Di tahun 2002, dari Rp. 2.250,00 milyar dalam DUK/DUP, anggaran yang direalisasikan pemerintah hanya Rp. 1.442,12 milyar. Pada tahun 2003, dari Rp. 3.261,14 milyar dalam DUK/DUP, anggaran yang direalisasikan pemerintah lebih tinggi dari jumlah yang diusulkan yaitu sebesar Rp. 3.355,29 milyar. Sama seperti halnya yang terjadi pada tahun 2004, dari Rp. 3.366,00 milyar dalam DUK/DUP, anggaran yang direalisasikan pemerintah lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 3.570,29 milyar. Dengan demikian terjadi peningkatan tajam penggunaan Kredit Ekspor di tahun 2003 dan 2004. (Lihat Grafik 2.14).

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 30.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 31

Grafik 2.14: Anggaran Kredit Ekspor Pertahanan Tahun 2000-2004

Sumber: Diolah dari Laporan Penelitian Reformasi Ekonomi Pertahanan di Indonesia.⁸¹

Untuk lebih rinci mengetahui belanja pertahanan yang menggunakan fasilitas kredit ekspor dalam rangka memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia dapat dilihat di Tabel 2.3. Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2004, terdapat 109 bentuk pinjaman luar negeri yang digunakan untuk belanja pertahanan. Selama tahun 2000 terdapat 16 bentuk pinjaman, untuk tahun 2001 terdapat 28 bentuk pinjaman, tahun 2002 terdapat 24 bentuk pinjaman, sedangkan tahun 2003 sebanyak 33 bentuk pinjaman dan untuk tahun 2004 hanya terdapat 8 bentuk pinjaman.

⁸¹ Lihat Andi Widjajanto dan Makmur Keliat, *Op. cit*, hal 3-4.

**Tabel 2.3: Pinjaman Luar Negeri Untuk Belanja Departemen Pertahanan
Tahun 2000-2004**

Year	Country	Cred.Ref	Name	Currency	Net Amount
2000	China	China North	Supply of 81 MM	USD	3,430,005.10
	P.R.Of		MORTAL		
	France	CA 30-11-2000	INDO NAVY TRAINING	EUR	2,811,228.67
			HELLY		
	France	C.A..29-DES-2000	2 SUPER PUMA KIT IPTN	FRF	44,201,672.32
	France	CA. 29-12-2000	3 PUMA SA 330L TNI AU	FRF	69,700,000.00
	Singapore	DRESDNER	DEBT REOG 2000/PARIS	USD	761,454.00
			CLUB		
	Singapore	STA LTD.	STEERABLE TP MC1-1B	USD	2,611,519.01
			AND		
	Singapore	STA LTD.	VESSEL NO.BSR910881	USD	9,581,880.00
	Singapore	DERSDNER	DEBR RESC 2000/PARIS	DEM	887,692.98
			CLUB I		
	Singapore	SIRANCO PVT	P.ALT.KOMUNIKASI	USD	2,650,208.60
	Singapore	EC SEA	DEFENCE CNRCT	FRF	28,014,480.00
	Singapore	311 20 201	11 UNITS OS SR 8.4 M	USD	3,999,997.60
		RIH			
Singapore	SIRANCO PL.	CENTRALIZED	USD	2,245,551.52	
Slovakia	16.6.2000	KEND.TEMPUR	USD	11,020,945.06	
		KORMAR BVP2			
Switzerland	C.S.F. CRYPTO	C.SUISE FIRST BOSTON	CHF	9,017,131.80	
United Kingdom	B/2182/VI/2000	PERALATAN HANKAM/1	USD	4,995,910.55	
United States	CHX USA	PENGADAAN	USD	2,410,432.89	
		SPAREPART TNI			
2001	China		S of GNBTW 23 MM AA	USD	12,149,999.45
	P.R.Of				
	China		S OF TANK ROCKET LT	USD	2,549,836.80
	P.R.Of				
	France	CA 26-01-2001	12 HELICOPTER LATIH	EUR	11,489,162.98
		COLIBRI			
France	THALES	PESAWAT MARITIM CN-	EUR	9,775,000.00	
		235			
France	004/KE/VII/1999	S OF TEST BENCH,SPRT	EUR	2,244,889.36	

France	THALES	SPAREPART&REFITTING	EUR	4,472,063.14
Germany	KFW-9164/1	REPOWERING OF 6 PARCHISM	EUR	12,319,712.00
Germany	KFW-9164/2	REPOWERING OF 6 PARCHISM	EUR	980,414.43
Germany	DEUTSCHE	SUBMARINE PROPULSION	EUR	5,423,921.00
Japan	ITOCHU-10.7.20	SISTEM KOMUNIKASI SATELIT	JPY	542,609,655.24
Japan	ITOCHU CORP.	P OF EQUIPMENT AND	JPY	411,003,546.00
Korea, Rep.Of	BNP PARIBAS	P7 PTLD (KT-18) & ILS	USD	29,251,984.53
Singapore	301 717	AM 2ND DG TUG BOAT MWPZV	USD	3,347,040.20
Singapore	302 501	1 UNIT PURPOSE HOSPITAL	USD	31,295,638.45
Singapore	SIRANCO-SING	TINDF.MEDICAL EQUIPMENT	USD	4,466,155.36
Singapore	UNICORN	50 MACHINE GUN AND	USD	3,185,896.55
Singapore	SING.TESC.AER	OVERHAUL BELL HELICOPTER	USD	3,114,400.00
Singapore	301 735	BULLET PROOF VEST &	USD	4,415,947.36
Singapore	301 631	STEERABLE PARACHUTE MCI-	USD	2,681,546.11
Singapore	CIC-SINGAPOR	ALAT BERAT ZENI	USD	5,118,751.58
Singapore	SOUTHERN	REPWR VAN SPEIJK CLASS	USD	7,993,600.00
Singapore	SIRANCO PTE	EXPLOSIVE ODE PASPAMPRES	USD	2,999,859.20
Singapore	SIRANCO	RANTIS 2.5 TN 4X4 ISUZU	USD	6,094,500.00
Singapore	ST AERO	SM, OB-412,205 A- 1,BO105 HELI	USD	6,311,447.74
Singapore	AAA TECH	CHECK "D" B 737 - 200	USD	2,591,248.37
Singapore	CONCORD	WAR HELMET MABES TNI,DP	USD	1,970,708.23
Singapore	LAWRENCE	PO 4 SO ENGINE (MOD 6PA6L)	USD	4,432,984.65

2002	United Kingdom	NITOR	NITOR ARMY SMALL ARMS	USD	2,967,026.75
	Australia	TEMPEST	NOMAD AIRCRAFT&SPARE	USD	299,272,600.00
	China P.R.Of	C-003/KE/XII/200	QW-3 MISSILE WEAPON	USD	2,090,273.25
	France	TURBOMECA	AS/MPB-IPTN-RETROFIT PUMA	EUR	3,981,137.47
	Germany	KFW-10427-01	4 PARCHIM C.CORVETES	EUR	10,940,585.45
	Japan		THE P ISUZU NPS71L-121 PS	JPY	621,860,000.00
	Japan		THE P EQUIPMENT N	JPY	261,028,592.88
	Japan		THE PURCHASE OF	JPY	366,587,314.32
	Malaysia	004/KE/XII/2002/	EJECTION SEAT TRAINER	USD	2,046,202.00
	Malaysia	EXIM MALAYSIA	EQUIPMENT	USD	3,392,301.27
	Malaysia	KTR/2002/19/XII/	PURCHASE OF MI-2	USD	9,716,000.00
	Malaysia	005/LN/KASAD/K	PURCHASE FOUR MI-17-IV	USD	18,360,000.00
	Netherlands	MISEF 12206	FOKKER PRESIDEN F-28	USD	6,335,510.35
	Netherlands	KOOLHAS	KOOLHAS-SUKU	USD	3,389,735.92
	Netherlands	KOOLHAS	KOOLHAS OVERHAUL F-27	USD	2,116,934.23
	Netherlands	ING-BANK-BELA	OVERHAUL KRI & CAS KORVET	EUR	4,301,735.10
	Singapore	KJB/02/XII/2002	GSM TEST SYSTEM GA 900	USD	2,105,155.00
	Singapore	KTR/15/02-19/XII	PACKAGES SP.PART	USD	1,983,475.17
	Singapore	KTR/17/02-19/XII	REPOWERING PARCHIM	USD	3,991,634.00
	Singapore		SM BO 105 HELICOPTER	USD	2,294,958.18
Singapore		PROC & MAINT SPAREPART	USD	2,549,647.07	
Singapore	AVIATION	P BIT PMSC 56 SERIES	USD	5,093,200.00	
Singapore	MTU-NAVY	MTU-SUCAD-KRI	EUR	1,940,631.93	
Singapore	MTU-SINGAPOR	MTU-MID LIFE MOD C	EUR	1,950,078.65	
Switzerland	CREDIT SUISE	PENGADAAN MESIN	CHF	5,546,250.00	

		SANDI			
2003	Germany	HAWKER GMBH	SUBMARINE P.BATTERY	EUR	4,484,442.32
	Japan	ITOCHU	IZUZU TRUCKS &	JPY	698,292,000.00
	Japan	ITOCHU	PURCHASE ALPERNIKA	JPY	198,602,274.00
	Japan	ITOCHU	RETROVING LAND ROVER	JPY	762,853,707.00
	Japan	ITOCHU	PROCU MAINTENANCE REPAIR	JPY	315,385,141.55
	Japan	ITOCHU, JAPAN	IZUZU TRUCKS &	JPY	498,719,070.10
	Korea, Rep.Of		MARINES UTILITY VEHICLES	USD	3,481,717.30
	Korea, Rep.Of	CD.:18-12-2002	WAR GAME SYSTEM	USD	2,554,593.00
	Korea, Rep.Of	EXIM, KOREA	WAR GAME SYSTEM (STAGE II)	USD	2,544,179.00
	Korea, Rep.Of	EXIM, KOREA	ANTIBALISTIC HELMET	USD	3,399,910.75
	Korea, Rep.Of	KRI CAKRA-401	OVERHAUL KRI CAKRA 401	USD	50,988,775.03
	Malaysia	008/LN/KASAD/K	PURCHASE 2 LCU 500 & 1 LCU	USD	661,176,750.00
	Malaysia	EXIM- MALAYSIA	MAINTENANCE FOR F-5	USD	4,500,000.00
	Malaysia	ABAD DELIMA	THE PERSONAL PARACHUTE	USD	1,699,941.56
	Malaysia	KJB/5/XII/2003	OP.SUPPORT ELECT.C	USD	1,699,986.36
	Netherlands	MISEF 12310	INSTALLATION LTN-92	USD	2,546,705.40
	Netherlands	RADAR APS-504	PROC.&REPAIR RADAR	USD	1,682,263.31
	Netherlands	KOOLHAS-GS	GROUND SUPPORT	USD	3,383,811.80
	Netherlands	SEWACO &	MLM SEWACO SYS & PROC.OF	EUR	4,396,543.40
	Singapore	003/KE/IV/2003/	ENGINE REPAIR/ OVERHAUL	GBP	1,580,048.00
Singapore	004/KE/IV/2003/	ENGINE REPAIR/OVERHAUL	GBP	1,460,342.50	
Singapore	008/LN/.../2002/A	LANDING CRAFT U 500/300	USD	6,611,767.50	
Singapore	CIC	TEAR GAS PRODUCT	USD	2,805,000.00	
Singapore	POLYTRUST	AMMO CALIB 105MM	USD	2,163,353.08	

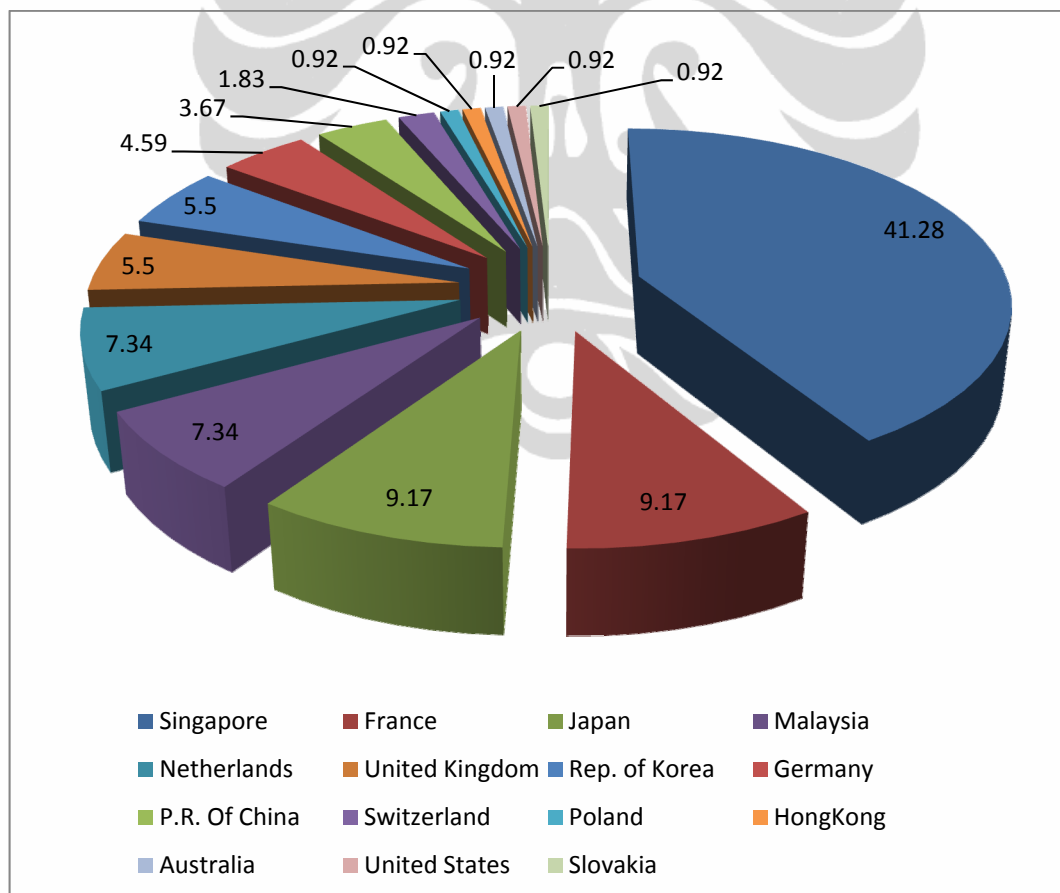
		HOW HE			
2004	Singapore	SCS	RADIO COMM.EQUIP	USD	2,113,151.00
	Singapore	SCS	AIRCRAFT SAFETY	USD	2,548,121.93
	Singapore	ESEA	012/KE/XII/2003AU	EUR	2,931,034.49
	Singapore	EUROCOPTER	KTR/22/02- 19/XII/2003/SET	USD	2,124,269.00
	Singapore	GOLDEN	PURCH.OF BULLET PROOF	USD	4,249,613.25
	Singapore	FERCO A.&	FERCO & TRIPEX TEC (TNI AU)	USD	2,549,945.60
	Singapore	FERCO AERO&	FERCO AEROSPACE (TNI-AU)	USD	2,549,917.65
	Singapore	CIC	LST FROSCH CLASS (TNI AL)	USD	10,187,313.75
	United Kingdom	ASCL,UK	PURCHASE ALKAPSUS P.	USD	2,122,373.44
	HongKong	FAR EAST	S.EXPLOSIVE ODDAE	USD	2,550,000.00
	Poland	LA-25.10.2004	PENG. PESAWAT DAN	USD	24,480,000.00
	Singapore	KELILARE	CORVETTE & PSK MID-L	EUR	6,331,208.03
	United Kingdom	ACSL	ENGINE&SPAREPARTS C-130	USD	7,498,813.01
	United Kingdom	ACSL	C-130 ENGINE OVERHAUL	USD	8,981,696.00
	United Kingdom	ACSL	SUPP.OF C-130 ENGINE	USD	8,999,999.45
	France	ID12546A	RE MM-38 MISSILE SYSTEM	EUR	9,774,023.94
France	YPPS/GEPP/TH	FS EARLY WARNING RADAR	USD	18,700,000.00	

Sumber: Diolah dari Direktorat Perbendaharaan Negara, Kredit Ekspor Indonesia 1966-2006, Jakarta: DPN, Departemen Keuangan, 2006.

Pembelian peralatan militer tersebut pada kenyataannya tidak tercatat sebagai bagian dari pengeluaran dalam anggaran pertahanan. Dengan demikian pembelian peralatan militer dengan fasilitas kredit ekspor bersifat *invisible* (tidak

terlihat) dalam anggaran untuk pertahanan. Sebenarnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 menyatakan secara tegas bahwa Fasilitas Kredit Ekspor tidak dapat digunakan untuk pendanaan pengadaan Alutsista. Namun melihat Keputusan Menteri Pertahanan No: KEP/01/M/I/2005 tentang Tata Cara pengadaan Barang/Jasa Militer Dengan Fasilitas Kredit Ekspor di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, tampaknya Departemen Pertahanan akan tetap menggunakan fasilitas kredit ekspor sebagai alternatif utama. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya kecenderungan peningkatan alokasi kredit ekspor untuk bidang pertahanan. (Lihat Grafik 2.14)

Grafik 2.15: Persentase Negara Pemilik Lembaga Kredit Ekspor Untuk Pengadaan Peralatan Militer Indonesia Tahun 2000-2004



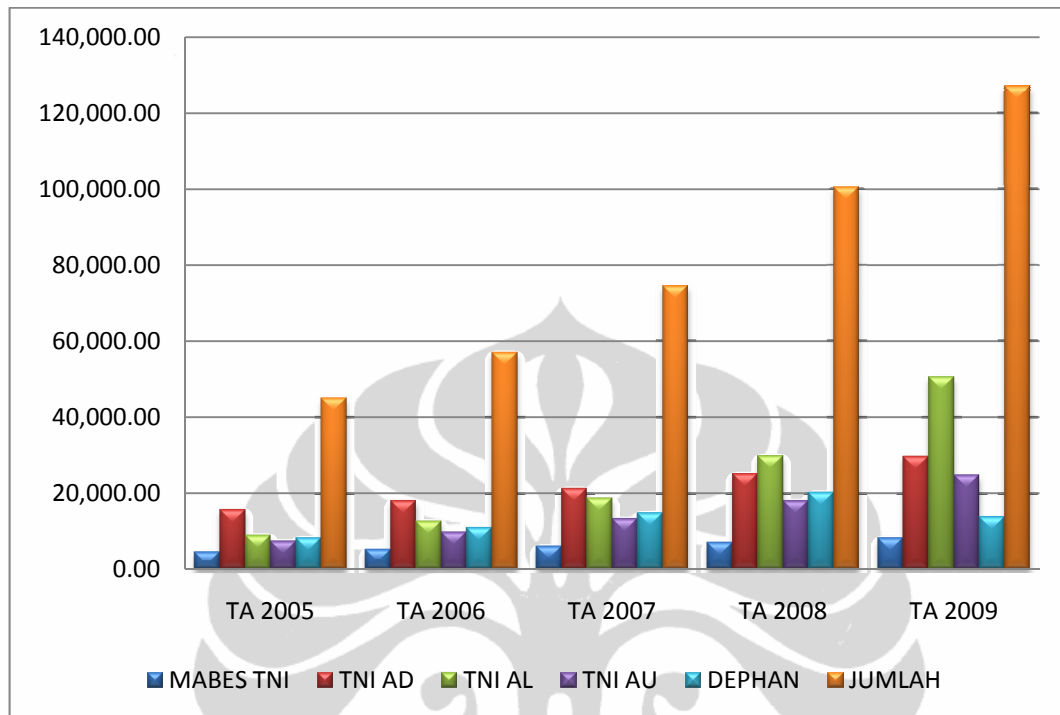
Sumber: Diolah dari Direktorat Perbendaharaan Negara, Kredit Ekspor Indonesia 1966-2006, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2006.

Grafik 2.15 memperlihatkan proporsi negara-negara yang memiliki lembaga pemberi kredit ekspor untuk pengadaan peralatan militer bagi Indonesia periode tahun 2000 hingga tahun 2004. Dari lima belas negara yang memiliki skema pendanaan untuk pengadaan alat militer dalam periode tahun 2000 hingga tahun 2004, Singapura memiliki jumlah tertinggi untuk lembaga kredit ekspor yang dapat memberikan utang luar negeri untuk pengadaan peralatan militer bagi Indonesia. Dalam kurun waktu 2000 hingga 2004 Singapura telah memberikan pinjaman sebanyak 45 kali, lalu diurutan selanjutnya ada Perancis dan Jepang yang melakukan pinjaman sebanyak 10 kali, sedangkan Malaysia dan Belanda melakukan pinjaman sama-sama sebanyak 8 kali, serta negara-negara lainnya yang persentasenya lebih kecil.

2.7. Proyeksi Anggaran Pertahanan Tahun 2005-2009

Bagaimana dengan dukungan anggaran di tahun-tahun berikutnya, tepatnya untuk tahun 2005-2009? Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana proyeksi anggaran pertahanan di tahun-tahun berikutnya, khususnya anggaran yang masuk dalam Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara 2005-2009. Dapat dilihat dalam Grafik 2.16 tampak ada perkembangan yang positif yaitu terlihat adanya perbedaan alokasi anggaran untuk 2005-2009 jika dibandingkan dengan kondisi tahun anggaran 2000-2004.

**Grafik 2.16: Kebutuhan Anggaran Pertahanan Negara TA 2005 S.D TA 2009
(Dalam Milyar Rupiah)**



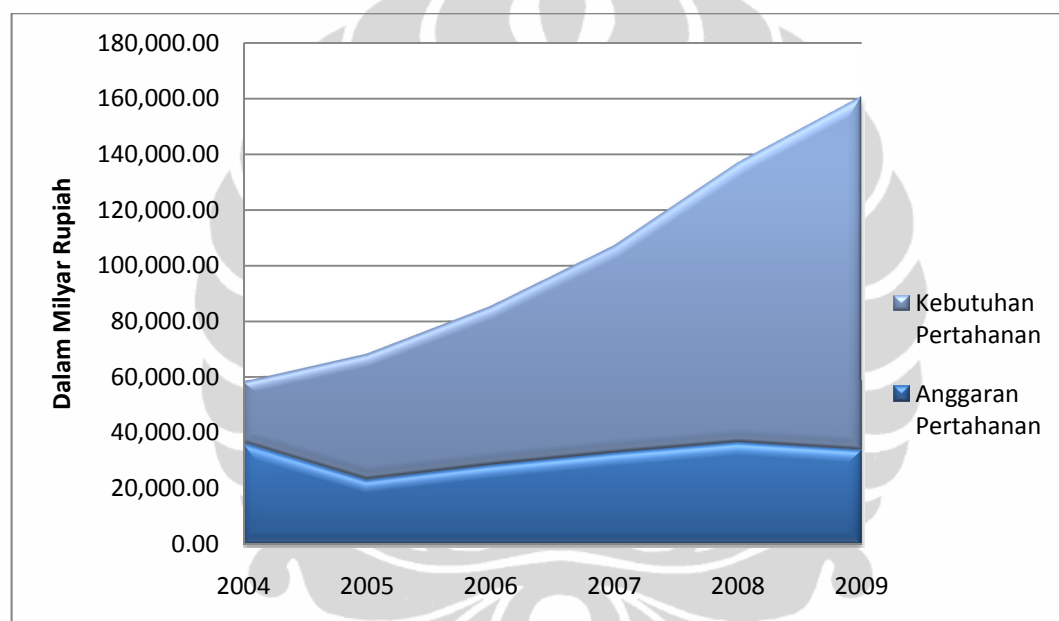
Sumber: Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Selain terus mengalami peningkatan, juga terdapat hal menarik lainnya dalam anggaran pertahanan periode 2005 hingga tahun 2009, bila di tahun-tahun sebelumnya proporsi alokasi anggaran pertahanan lebih didominasi oleh TNI AD, maka di periode ini lebih diproyeksikan khusus untuk TNI AL dan TNI AU. Dominasi proporsi anggaran pertahanan oleh TNI AD salah satunya disebabkan oleh strategi pertahanan nasional yang lebih mengandalkan konsepsi pertahanan landas darat (*land-based defence*)⁸². Dalam pergerakan grafik 2.16 dapat dilihat bahwa mulai tahun 2008, alokasi anggaran untuk AL melebihi alokasi anggaran untuk AD. Tentunya hal tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan yang rasional dari TNI.

⁸² Konsepsi pertahanan landas darat (*land-based defence*) yang selama ini digunakan sebagai strategi pertahanan nasional dilatarbelakangi oleh pengalaman perang masa lalu yang didominasi oleh perang-perang internal. Pengalaman-pengalaman perang Indonesia di masa lalu menunjukkan bahwa (1) militer Indonesia tidak pernah menghadapi agresi militer yang dilakukan oleh negara lain ke wilayah Indonesia; dan (2) dalam 20 tahun terakhir, militer Indonesia disibukan untuk menghadapi gerakan bersenjata yang menggunakan strategi gerilya. Lihat Andi Widjajanto, "Transformasi Pertahanan dan Kaji Ulang Pertahanan: Suatu Kerangka Kerja Integratif" dalam Ikrar Nusa Bhakti (ed.), *Kaji Ulang Pertahanan: Perspektif Politik*, Jakarta: LIPI, 2005.

Walaupun sejak tahun 2000 pemerintah telah meningkatkan secara signifikan anggaran pertahanan namun tetap terdapat kesenjangan strategis (*strategic gap*) yang semakin meningkat antara kebutuhan pertahanan dengan alokasi anggaran pertahanan yang muncul di sektor ekonomi pertahanan. Hal tersebut dapat dilihat pada kesenjangan ekonomi pertahanan Indonesia sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. (Lihat Grafik 2. 17)

Grafik 2. 17 : Kesenjangan Ekonomi Pertahanan Indonesia 2005-2009



Sumber: Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Melihat kesenjangan ekonomi pertahanan yang cenderung terus meningkat ini menimbulkan kekhawatiran perkembangan ekonomi pertahana Indonesia. Kondisi tersebut telah memaksa kita untuk dengan segera mencari solusi ataupun alternatif kebijakan lain yang dapat mempersempit ruang kesenjangan tersebut. Salah satu langkah yang mungkin untuk diajukan adalah melakukan efisiensi sistem persenjataan Indonesia⁸³.

⁸³ Lihat Andi Widjajanto, "Pengembangan Kemampuan Pertahanan Indonesia", Universitas Indonesia.

Efisiensi sistem persenjataan Indonesia perlu dilakukan karena melihat kondisi sistem persenjataan yang ada pada tahun 2004 yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 173 jenis sistem persenjataan yang berasal dari 17 negara produsen.⁸⁴ Dengan adanya berbagai variasi sistem persenjataan tentunya akan berimplikasi terhadap besarnya biaya perawatan dan biaya operasional. Dengan adanya efisiensi jenis sistem persenjataan dapat dikurangi jumlahnya hingga 40% dari jumlah sistem persenjataan yang ada. Proses pengurangan senjata tersebut atau dikenal sebagai *arms disposal*⁸⁵ diterapkan di setiap matra yang ada yang ada yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

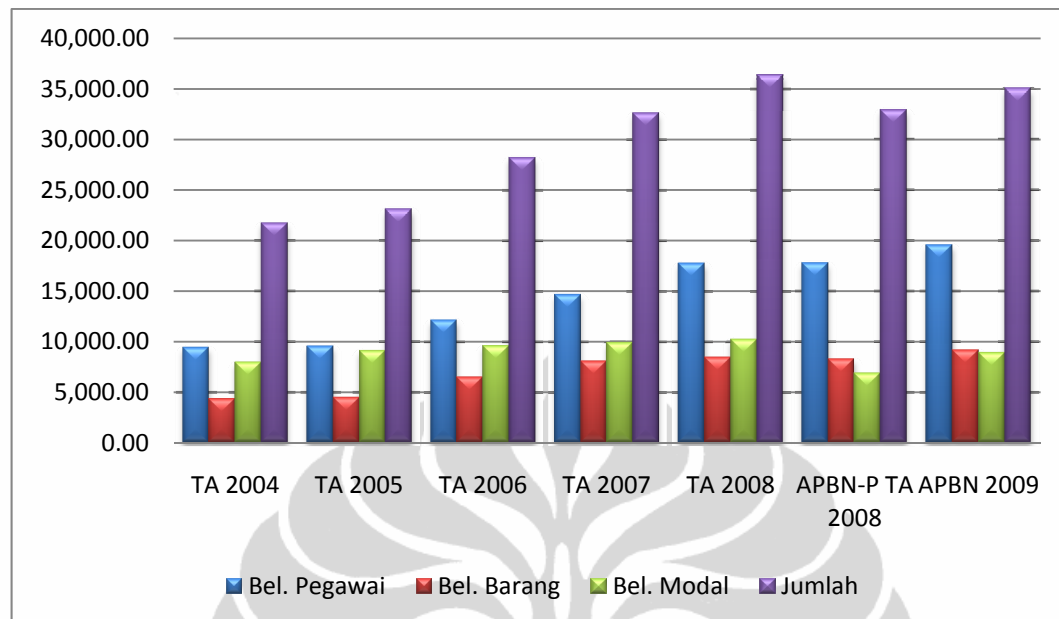
Sementara bila melihat perkembangan anggaran berdasarkan jenis belanja pertahanan dapat dikatakan proporsi anggaran yang terbagi dalam belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal tidak ideal. Secara normatif, idealnya anggaran untuk belanja pegawai tidak melebihi dari 30% dari total keseluruhan belanja pertahanan. Sedangkan untuk belanja barang dan modal normalnya sekitar 60% hingga 70% dari total keseluruhan belanja pertahanan.

Bila dilihat kenyataannya rata-rata persentase belanja pegawai sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 adalah 47,28%, sedangkan untuk rata-rata persentase belanja barang dan modal sebesar 52,72%. Pada tahun 2004 persentase belanja pegawai sebesar 43,26% dengan jumlah Rp 9.393,24 milyar, sedangkan persentase belanja barang dan modal sebesar 56,74% yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp 4.348,68 milyar dan belanja modal sebesar Rp 7.969,77 milyar. Kesenjangan proporsi anggaran yang paling signifikan terjadi pada tahun anggaran 2009 dimana persentase belanja pegawai sebesar 55,74% yang berjumlah Rp 19.528,44 milyar, sedangkan persentase belanja barang dan modal hanya 44,26% yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp 9.173,89 milyar dan belanja modal sebesar Rp 8.864,42 milyar. (Lihat Grafik 2.18)

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Arms Disposal* merupakan sebuah proses pemusnahan sistem persenjataan yang sudah tidak layak pakai atau yang tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi militer terkini. Lihat Michael O'Hanlon, *How to Be a Cheap Hawk*, Washington D.C: Brookings Institution, 1998.

Grafik 2.18: Perkembangan Anggaran Pertahanan TA 2004 s.d Pagu Sementara 2009 Menurut Jenis Belanja (Dalam Milyar Rupiah)

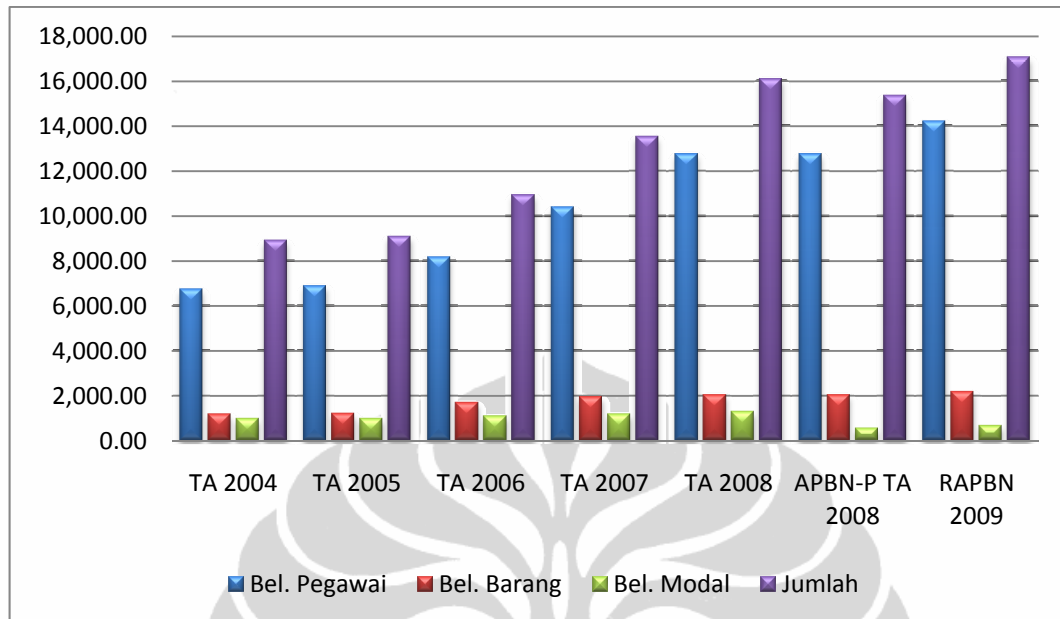


Sumber: Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Proporsi anggaran yang tidak ideal tersebut juga terdapat di masing-masing angkatan yang ada. Kesenjangan proporsi anggaran berdasarkan jenis belanja pertahanan, paling tinggi terjadi pada Angkatan Darat. Rata-rata persentase proporsi anggaran TNI AD untuk belanja pegawai Tahun Anggaran 2004 hingga pagu sementara 2009 adalah 78,35%. Sedangkan rata-rata persentase anggaran TNI AD untuk belanja barang dan modal sebesar 21,65%.

Pada tahun 2004, anggaran belanja pegawai TNI AD sebesar 6.744,08 milyar rupiah, untuk belanja barang sebesar 1.186,42 milyar rupiah dan untuk belanja modal sebesar 975 milyar rupiah. Di tahun-tahun selanjutnya, khususnya dalam tahun Renstra kedua alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam kalangan TNI AD terus meningkat. Dalam Rancangan APBN tahun 2009, anggaran belanja pegawai sebesar 14.200,20 milyar rupiah, anggaran untuk belanja barang hanya sebesar 2.183,74 milyar rupiah dan anggaran untuk belanja modal hanya sebesar 662,83 milyar rupiah. (Lihat Grafik 2.19)

Grafik 2.19: Perkembangan Anggaran UO TNI AD TA 2004 s.d Pagu Sementara 2009 Menurut Jenis Belanja (Dalam Milyar Rupiah)

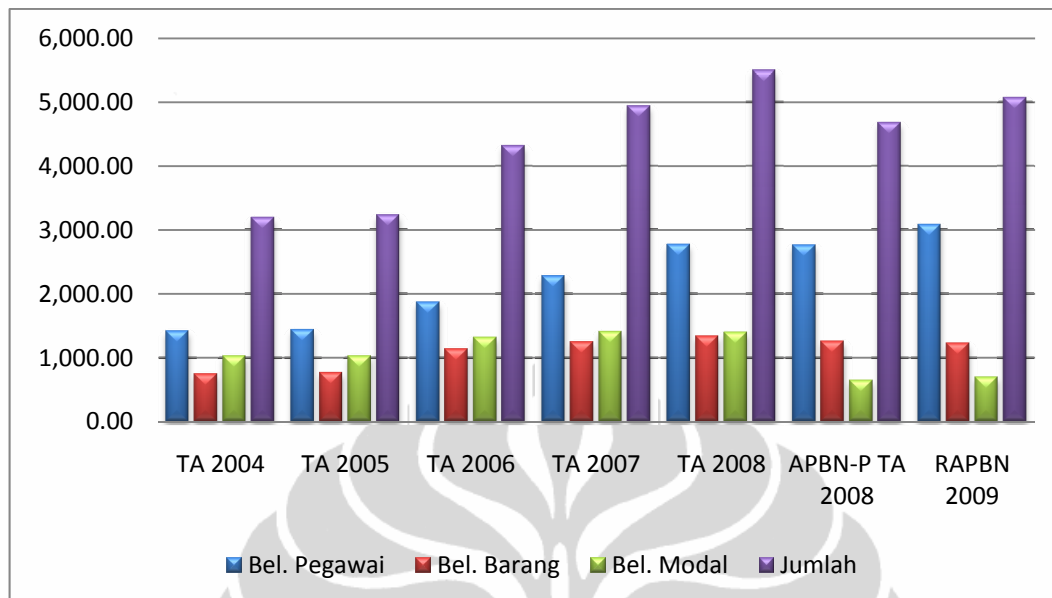


Sumber: Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kesenjangan proporsi anggaran berdasarkan jenis belanja pertahanan paling tinggi setelah Angkatan Darat terjadi dalam anggaran Angkatan Laut. Rata-rata persentase proporsi anggaran TNI AL untuk belanja pegawai Tahun Anggaran 2004 hingga pagu sementara 2009 adalah 49,79%. Sedangkan rata-rata persentase anggaran TNI AD untuk belanja barang dan modal sebesar 50,21%.

Dalam Grafik 2.20 memperlihatkan pada tahun 2004, anggaran belanja pegawai TNI AL sebesar 1.421,32 milyar rupiah, untuk belanja barang sebesar 747,15 milyar rupiah dan untuk belanja modal sebesar 1.025 milyar rupiah. Seperti halnya yang terjadi pada anggaran TNI AD, anggaran belanja pegawai mendominasi dan terus meningkat di tiap tahunnya. Belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2009 sebesar 3.007,19 milyar rupiah, sedangkan untuk belanja barang dan modal masing-masing sebesar 1.229,14 milyar rupiah dan 694,17 milyar rupiah.

Grafik 2.20: Perkembangan Anggaran UO TNI AL TA 2004 s.d Pagu Sementara 2009 Menurut Jenis Belanja (Dalam Milyar Rupiah)

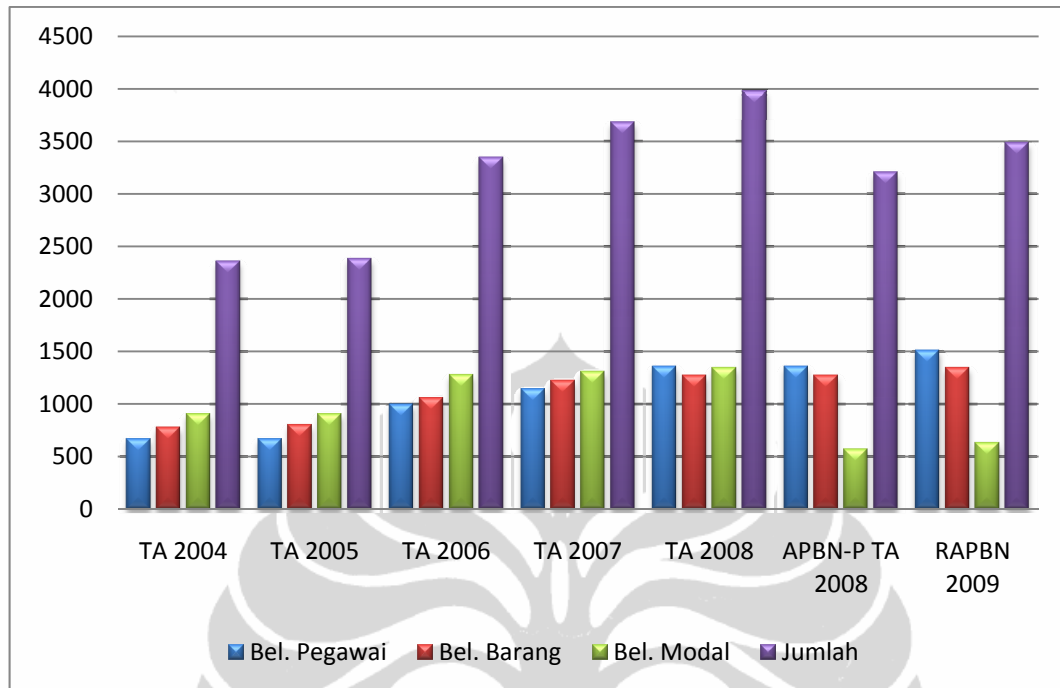


Sumber: Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Untuk proporsi anggaran TNI AU dapat dikatakan hampir mendekati porsi ideal sehingga kesenjangan antara belanja pegawai dengan belanja barang dan modal tidak begitu mencolok seperti yang terjadi pada anggaran TNI AD dan TNI AL. Rata-rata proporsi anggaran TNI AU untuk belanja pegawai sebesar 33,90%, sedangkan untuk rata-rata proporsi anggaran belanja barang dan modal sebesar 66,10%.

Dalam Grafik 2.21 memperlihatkan pada tahun 2004, anggaran belanja pegawai TNI AU sebesar 668,80 milyar rupiah, untuk belanja barang sebesar 780,84 milyar rupiah dan untuk belanja modal sebesar 910 milyar rupiah. Seperti halnya yang terjadi pada anggaran TNI AD dan AL, anggaran belanja pegawai TNI AU terus meningkat di tiap tahunnya walaupun tidak menunjukkan angka yang signifikan disetiap kenaikannya. Sebagai perbandingan, belanja pegawai TNI AU dalam RAPBN tahun 2009 sebesar 1511,63 milyar rupiah, sedangkan untuk belanja barang sebesar 1.344,89 milyar rupiah dan untuk belanja modal sebesar 632,71 milyar rupiah.

Grafik 2.21: Perkembangan Anggaran UO TNI AU TA 2004 s.d Pagu Sementara 2009 Menurut Jenis Belanja (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Ditrenbanghan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

2.8. Kesimpulan

Pemaparan mengenai anggaran pertahanan Indonesia selama tahun 2000 hingga 2004 pada bab ini, memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan secara nominal dengan persentase rata-rata 0,27% setiap tahunnya. Namun peningkatan secara nominal tersebut tidak seiring dengan persentase alokasi anggaran pertahanan dari PDB maupun APBN tahun 2000 hingga 2004. Persentase alokasi anggaran pertahanan dari PDB maupun APBN bersifat stagnan karena tidak ada perubahan yang signifikan. Rata-rata persentase alokasi anggaran pertahanan dari PDB tahun 2000-2004 sebesar 0,85% per tahun, sedangkan untuk rata-rata persentase alokasi anggaran pertahanan dari APBN tahun 2000-2004 sebesar 4,30% per tahun. Alokasi anggaran pertahanan dari PDB dan APBN masih sangat kurang bila dilihat dari besarnya kebutuhan pertahanan Indonesia. Bila melihat perbandingan alokasi anggaran dengan sektor lain seperti pendidikan dan

kesehatan dari APBN, maka dapat dikatakan bidang pertahanan belum menjadi salah satu skala prioritas dibandingkan dengan bidang lainnya.

Melihat proporsi anggaran pertahanan berdasarkan pembagian belanja rutin dan belanja pembangunan tahun 2000-2004, anggaran pertahanan lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin daripada untuk membiayai pengembangan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara nominal yang diperuntukan untuk anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan. Kondisi seperti ini menjadi penghambat bagi upaya meningkatkan kemampuan TNI yang professional secara menyeluruh.

Disebabkan alokasi anggaran pertahanan Indonesia yang masih minim maka untuk memenuhi pengadaan alutsista dari pasar senjata internasional, Departemen Pertahanan menggunakan fasilitas Kredit Ekspor. Anggaran Kredit Ekspor pertahanan tahun 2000 hingga 2004 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun peningkatan anggaran kredit ekspor tersebut berdampak kepada membesarnya stok hutang luar negeri pemerintah.

Dengan alokasi anggaran pertahanan masih minim, maka Departemen Pertahanan Republik Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan pertahanan, termasuk untuk melakukan proses *arms build-up* atau modernisasi pertahanan. Kondisi ini tidak memberikan banyak pilihan bagi Departemen Pertahanan kecuali mengarahkan pada program *arms maintenance*. Kondisi ini diperburuk dengan masih belum efektif penggunaan anggaran dengan banyaknya temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap penggunaan anggaran pertahanan baik di lingkungan Departemen Pertahanan maupun dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia, baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.

Sebagai perbandingan di periode Rencana Strategis kedua yaitu dalam periode tahun 2005 hingga 2009, anggaran pertahanan secara nominal terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan anggaran tersebut semakin memperjelas kesenjangan strategis (*strategic gap*) yang semakin meningkat antara kebutuhan pertahanan dengan alokasi anggaran pertahanan yang muncul di sektor ekonomi pertahanan Indonesia.

Selain kesenjangan strategis tersebut terdapat hal lain yang membuat anggaran pertahanan Indonesia semakin tidak efektif kedepannya, yaitu dengan adanya proporsi pembagian anggaran yang tidak ideal di setiap matra baik AD, AL maupun AU. Jumlah nominal belanja pegawai jauh lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk belanja barang dan modal.

Melihat kondisi anggaran yang secara keseluruhan dapat dikatakan belum mampu mendukung terciptanya kapabilitas militer yang handal ini, maka dibutuhkan upaya-upaya yang jauh lebih efektif dalam menggunakan anggaran yang sudah ada untuk memperkecil bentuk penyelewengan-penyelewengan lainnya, selain terus mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan anggaran khususnya dalam menaikkan persentase anggaran pertahanan dari PDB dan APBN agar kapabilitas pertahanan Indonesia mampu memiliki daya saing, terutama di kawasan Asia Tenggara.

